

**PENDIDIKAN POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN BAGI
KADER DI JAWA TENGAH 2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)



Disusun Oleh:

M ARIF ASHARI

1606016082

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Ibu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Ditempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya,
maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :


Nama : Muhammad Arif Ashari
NIM : 1606016082
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Pendidikan Politik Partai PPP Bagi Kader Di Jawa Tengah

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas
perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Minggu 12 Juni 2022

Pembimbing



H. Drs. Nur Syamsudin, MA
NIP. 196805051995031002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PENDIDIKAN POLITIK PARTAI PPP BAGI KADER DI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

Disusun Oleh :

M Arif Ashari

1606016082

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Pada tanggal 23 Desember 2022
dan dinyatakan lulus Susunan Dewan Penguji



H. Drs Nur Syamsudin, MA

NIP. 196805051995031002

Penguji I

Dr. Moh. Khasan, M Ag

NIP : 197412122003121004

Penguji II

Dr. Rofiq, M.Si

NIP : 197303052016011901

Pembimbing

H. Drs Nur Syamsudin, MA

NIP. 196805051995031002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Arif Ashari

NIM : 1606016082

Program Studi : Ilmu Politik

Dengan ini penulis menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“PENDIDIKAN POLITIK PARTAI PPP BAGI KADER DI JAWA TENGAH TAHUN 2019”** ialah benar-benar karya sendiri, bukan hasil dari menjiplak atau mencuri dari karya orang lain kecuali beberapa bagian yang disebutkan rujukan sumber di dalamnya. Apabila skripsi saya terdapat ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab dan saya siap menerima sanksi yang diberlakukan.

Semarang, ,23 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan



M Arif Ashari

NIM: 1606016082

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pendidikan Politik Partai PPP Bagi Kader Di Jawa Tengah”.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang utusan Allah SWT yang membawa risalah dan rahmat bagi alam semesta dan pemberi syafa'at bagi umatnya di akhirat kelak. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Progam Studi S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Sebagai penghormatan dan kebanggaan, penulis ucapkan terima kasihkepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak H. Drs. Nur Syamsudin, MA selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik dan juga selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, dukungan, dan motivasi selama kuliah hingga penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Ahwan Fanani, M.Ag., selaku Wali Dosen, yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, dukungan, dan motivasi selama kuliah hingga penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan wawasan untuk penulis selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh pegawai dan staff tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
8. Ibu dan Ayah tercinta, adikku beserta keluarga besar yang selalu mendoakan, memberikan semangat, motivasi dan dukungan selama kuliah sampai penulisan skripsi ini.
9. Seluruh sahabat dan teman terdekat yang telah banyak membantu dan mendukung penulis selama penulisan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman di UIN Walisongo Semarang baik dalam aktivitas akademik maupun aktivis organisasi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama menempuh pendidikan.
11. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan atas kebaikan bagi mereka semua dengan rahmat yang terbaik dari-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 12 juni 2022

Penyusun,



M. Arif Ashari
1606016082

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Orangtua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan serta menjadi
penyemangat penulis selama ini.

Almamater penulis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

“Semua sekolah sama saja. Asalkan kita rajin belajar, kita bisa pintar kok. Apa gunanya bersekolah ditempat bagus, tapi kita gak serius belajar? Sia-sia kan?”

Adham T. Fusama

ABSTRAK

Dewasa ini, untuk bertahan dalam eksistensi politik di Indonesia setiap partai politik dituntut untuk melakukan program Pendidikan Politik yang bertujuan untuk menguatkan kelembagaan dan eksistensi partai dalam masyarakat. pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terhindarkan. Pendidikan politik akan menjadikan partai bekerja dalam koridor fungsi – fungsi yang semestinya serta mengantisipasi perubahan partisipasi politik dari warga negara akibat modernisasi dan perubahan zaman. Kaderisasi partai politik tidak hanya menyangkut regenerasi kepemimpinan melainkan juga tentang kelembagaan internal yaitu pendidikan ideologi kepada kader agar mampu mengoperasionalkan ideologi partai secara nyata baik di eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Masalah yang dihadapi oleh PPP di Provinsi Jawa Tengah sendiri antara lain adalah rendahnya pemahaman ideologi kader partai dalam kehidupan bermasyarakat dan melemahnya sikap disiplin, komitmen serta loyalitas kader PPP. Pendidikan kader ditingkat DPW yakni Pendidikan Kader Madya merupakan model kaderisasi yang tentunya berperan penting dalam menentukan jati diri dan kualitas dari masing – masing kader. Pendidikan Kader Madya ini dimaksudkan dalam rangka membangun kesadaran ideologi, kesadaran berorganisasi, kepedulian pada lingkungan sekitar, hingga kesadaran berpolitik yang lebih besar untuk mewujudkan cita - cita politik bersama.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang Ketua DPW , 1 orang Wakil Ketua DPW PPP Jateng, dan 1 orang anggota. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dengan langkah-langkah meliputi: pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini 1) Kaderisasi merupakan kelembagaan internal PPP yang dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu model kaderisasi dengan sistem kelas (pendidikan dan pelatihan kader). Model kaderisasi kelas merupakan model kaderisasi berjenjang berupa pemberian materi kepada kader, sedangkan sistem gerakan adalah penugasan – penugasan kepada kader. 2) Pendidikan Kader Madya merupakan kelembagaan internal bentuk kaderisasi yang tidak wajib diikuti oleh seluruh kader PPP, namun setiap DPC atau Organisasi sayap Partai diwajibkan mendelegasikan 5 orang kader. Pendidikan Kader Madya juga merupakan penanaman ideologi dan nilai – nilai partai untuk membentengi dari praktik pragmatisme politik dan bidang kehidupan lainnya guna mewujudkan cita – cita bersama. 3) Pengaruh Pendidikan Kader Madya terhadap kader PPP adalah terciptanya kader ideologis, disiplin, loyal dan handal untuk memperkuat partai dalam mensejahterakan rakyat.

Kata kunci : Pendidikan Politik, Partai PPP.

Abstract

Today, to survive in political existence in Indonesia, every political party is required to carry out a Political Education program that aims to strengthen the institutionalization and existence of parties in society. Political education is an unavoidable necessity. Political education will make the party work in the corridor of its proper functions and anticipate changes in the political participation of citizens due to modernization and changing times. The cadre formation of political parties is not only about leadership regeneration but also about internal institutionalization, namely ideological education for cadres so that they are able to operationalize party ideology in a real way both in the executive, legislative and party structures. The problems faced by PPP in Central Java Province include the low understanding of the ideology of party cadres in social life and the weakening of discipline, commitment and loyalty of PPP cadres. Cadre education at the DPW level, namely Middle Cadre Education, is a regeneration model which certainly plays an important role in determining the identity and quality of each cadre. Middle Cadre Education is intended to build ideological awareness, organizational awareness, concern for the surrounding environment, to greater political awareness to realize shared political ideals.

The type of research used is descriptive qualitative. The informants in this study consisted of 1 Chairperson of the DPW, 1 Deputy Chairperson of the Central Java PPP DPW, and 1 member. Data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is qualitative, with steps including: data collection, data analysis, and drawing conclusions.

The results of this study 1) Cadreization is an internal institutionalization of PPP which can be divided into two types, namely the regeneration model with a class system (education and training of cadres). The class cadre model is a tiered cadre model in the form of giving material to cadres, while the movement system is assignments to cadres. 2) Middle Cadre Education is an internal institutionalization of a form of cadre which is not required to be attended by all PPP cadres, however, each DPC or Party wing organization is required to delegate 5 cadres. Madya Cadre Education is also the inculcation of party ideology and values to fortify pragmatism from political practices and other areas of life in order to realize shared ideals. 3) The influence of Middle Cadre Education on PPPcadres is the creation of ideological, disciplined, loyal and reliable cadres to strengthen the party in the welfare of the people.

Keywords: Political Education, PPP Party.

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
Abstract	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan manfaat peneilitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Teknik Pengumpulan Data	14
3. Analisis Data.....	15
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II	19
KERANGKA TEORI	19
1. Pengertian Pendidikan Politik	19
2. Tujuan Pendidikan Politik.....	21
BAB III	26
PROFIL PARTAI PPP DAN DINAMIKA POLITIK PARTAI PPP DI JAWA TENGAH	26
A. SEJARAH PARTAI PPP	26
B. VISI/MISI PPP	28
Visi	28
Misi	30
C. LOGO PPP	31
D. PEDOMAN PARTAI PPP	32
E. STRUKTUR PENGURUS DPW PARTAI PPP JATENG.....	38
F. DINAMIKA POLITIK DPW PPP JAWA TENGAH	38
BAB IV	41
PENDIDIKAN POLITIK YANG DILAKUKAN PARTAI PPP DI JAWA TENGAH	41
A. PENGERTIAN PENDIDIKAN POLITIK.....	41
A. Bentuk-bentuk pendidikan politik	43
B. MATERI PENDIDIKAN POLITIK	47
C. METODE PENDIDIKAN POLITIK	49

D.	TUJUAN PENDIDIKAN POLITIK	52
E.	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN.....	55
BAB V	57
FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DI DPW PPP JAWA TENGAH.....		57
A.	FAKTOR PENDUKUNG DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DPW PPP JAWA TENGAH	57
B.	FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DPW PPP JAWA TENGAH	64
BAB VI	67
PENUTUP	67
A.	KESIMPULAN	67
B.	SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik memegang peranan yang sangat penting dalam menegakkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, terutama sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Fungsi lain partai politik, selain untuk penghubung masyarakat dan pemerintah, adalah mendidik kader. Jadi parpol di sini berperan sebagai akademisi yang mengkader masyarakat, hingga kader-kader rakyat di dunia politik.

Alasan peneliti mengambil judul “**Pendidikan Politik Partai PPP Bagi Kader Di Jawa Tengah**” yaitu Merosotnya pamor partai PPP ini masih ditambah lagi dengan konsolidasi internal partai yang sangat rapuh. Hal ini terbukti partai PPP yang disibukkan dengan kemelut internal yang berkepanjangan. Dan memang, dalam sejarahnya partai-partai islam hampir selalu menghadapi kemelut internal yang serius. Ketika berada dalam wadah tunggal yang bernama Masyumi, konflik sudah mewarnai politik islam antara kubu tradisionalis dan kubu modernis disisi lain. Ketika Orde Baru mengambil alih kekuasaan Orde Lama, politik islam juga penuh konflik, terutama ketika penguasa mengambil kebijakan penyederhanaan partai melalui fusi. PPP sebagai metamorphose partai islam pada masa Orde Baru justru mengulang kembali konflik yang pernah terjadi ditubuh Masyumi dulu. Berbagai problem yang dialami oleh kekuatan politik partai PPP, tampaknya merupakan salah satu faktor penyebab mengapa partai PPP tidak pernah meraih kemenangan dipanggung politik Indonesia.

Budiarjo (2012: 164) mengatakan bahwa "individu sebagai kekuatan politik mengacu pada politik aktor atau orang yang berperan dalam kehidupan

politik”. Kader politik perlu mendapatkan yang lebih memadai, konstruktif dan pendidikan politik yang sistematis sangat diperlukan untuk membentuk kompetensi kader politik. Dengan adanya pendidikan politik melalui kegiatan peran partai itu dimaksudkan agar kader partai memahami sistem politik. Affandi (2009 : 27) “menyatakan bahwa pendidikan politik dianggap penting oleh hampir semua masyarakat dan dianggap sebagai penentu perilaku politik seseorang. Penilaian ini didasarkan pada tujuan pendidikan politik sebagai alat untuk memelihara sikap dan norma politik dan untuk membawa mereka dari satu generasi ke generasi berikutnya, keduanya melalui akulturasi informal dan melalui pendidikan politik yang direncanakan untuk mendukung stabilitas sistem politik”.

Berangkat dari pengertian ini, partai politik adalah wajib untuk memberikan pendidikan politik kepada kader agar partai politik memiliki kader-kader yang beretika dan bermoral baik, sehingga dapat menyampaikan aspirasi masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Makna pendidikan politik bagi Partai PPP sendiri sebagaimana UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11 Partai Politik diwajibkan melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat untuk membangun perkembangan politik dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Makna pendidikan politik bagi Partai PPP sendiri yaitu, pertama untuk menjalankan fungsi pendidikan politik sesuai amanat UU Partai Politik untuk menjalankan pendidikan politik yang tujuannya kader-kader dituntut untuk mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan juga program-program pemerintah mampu mewartakan sesuai kebutuhan masyarakat. Kedua yakni penanaman ideologi partai, melihat situasi politik pasca rezim Orde Baru tampak jelas bahwa telah terjadi perubahan penting dalam perpolitikan nasional, khususnya menyangkut aspek, peran, dan makna ideology bagi Partai PPP. Ketiga yaitu sebagai wujud pengejawantahan Visi/Misi “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera,

bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, serta menjunjung tinggi harkat - martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”. Untuk mewujudkan cita-cita partai PPP itu sendiri terinci dalam 5 prinsip dan 6 perjuangan partai.

Kaderisasi dalam partai adalah aktivitas utama yang sangat penting yang menandakan keberlanjutan kehidupan partai. Kaderisasi merupakan salah satu media rekrutmen, pemantapan komitmen, menanamkan ideology paratai yang berasaskan keislaman, pengembangan kapasitas personal dan penguatan kelembagaan partai yang berorientasi jangka panjang. Tanpa kaderisasi, partai bagaikan organisme yang sulit untuk bernafas apalagi untuk memproduksi. Akibatnya, cepat atau lambat akan musnah karena tidak lagi ada regenerasi. Kader merupakan aparat idologi partai atau agen ideology partai yang menerjemahkan kepentingan sekaligus memperjuangkan terwujudnya citai-cita partai.

Dalam strategi atau upaya Partai PPP dalam melaksanakan pendidikan politik bagi kader di lingkungan partai PPP yaitu menerapkan kaderisasi berjenjang. Kaderisasi yang diterapkan bagi kader sendiri terbagi menjadi 2, yang pertama yaitu secara formal dan kedua kaderisasi non formal. Dalam penerapannya, kaderisasi formal terbagi dalam tiga jenjang, yang pertama yaitu kaderisasi yang dilaksanakan di tingkat DPC yaitu latihan kepemimpinan kader dasar(LKKD), kedua yaitu jenjang kaderisasi yang dilaksanakan di tingkat DPW yaitu latihan kepemimpinan kader madya(LKKM), ketiga yaitu latihan kepemimpinan kader utama(LKKU) yang dilakukan oleh DPP. Selain program-program yang telah dijalankan oleh Partai PPP yang tercantum dalam program formal Partai PPP, ada juga program untuk menunjang kapasitas kader yaitu program sekolah politik dan sekolah demokrasi. Kedua kaderisasi non formal, yaitu distribusi kader ke lembaga atau instansi yang dimana lembaga itu mampu dijadikan ruang kaderisasi atau peningkatan kualitas kader.

Pada awal kelahirannya, sebagai kelanjutan dari partai politik Islam, PPP menetapkan Islam sebagai asas partai. Tetapi belakangan karena ada ketentuan yang mengharuskan semua partai politik untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal, maka, maka PPP tidak bisa berbuat lain kecuali mengikuti ketentuan tersebut. Secara politis maupun psikologis perubahan ini sangat mempengaruhi atau berdampak pada perilaku elit partai. Penerimaan Pancasila sebagai asas partai, telah menciptakan suasana keterasingan dan kegelisahan dikalangan partai.

Merosotnya pamor partai PPP tidak hanya semata-mata kader partai belum mampu menyampaikan cita-cita partai, tetapi juga di pengaruhi problematika internal partai yang belum selesai. Penanaman ideology partai belum mampu mewujudkan cita-cita partai secara kelembagaan sehingga berdampak pada jalanya roda kepemimpinan partai itu sendiri. Kisruh elit partai selama 3,5 tahun dimulai dari tahun 2016, hingga dicap sebagai partai penista agama karna dukunga PPP di pilkada Jakarta membawa dampak sampai ke daerah-daerah, dan juga ditetapkanya Roma Hurmuzy (Gus Romy) sebagai tersangka menjelang pemilu 2019 menjadikan kisruh internal partai terus berlanjut dan tidak stabil. Meskipun persoalan-persoalan diatas tadi membawa dampak diberbagai daerah dan tidak berdampak di wilayah tertentu. Lebih penting sebenarnya seberapa siap kelembagaan partai dalam menyiapkan calon-calon yang akan duduk di kursi pelayanan publik(eksekutif dan legislatif) ketika berada dibawah tekanan yang begitu rumit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendidikan politik yang dilakukan partai PPP di Jawa Tengah ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat partai PPP dalam melaksanakan pendidikan politik bagi kader ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pendidikan politik partai Persatuan Pembangunan bagi kader di Jawa Tengah, Studi Kasus antara lain:

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana pola partai PPP dalam menjalankan program pendidikan politik bagi kader.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis terkait hambatan-hambatan partai dalam melaksanakan pendidikan politik bagi kader PPP di Jawa Tengah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pemikiran bagi pengembangan asas, teori dan konsep politik mengenai pentingnya pendidikan politik bagi kader.
 - 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran umum, pemahaman, pengetahuan terkait adanya pendidikan politik bagi kader di dalam internal partai bagi masyarakat umum.
- b. Secara Praktis
 - 1) Sebagai sarana pembelajaran pentingnya pendidikan politik bagi kader.
 - 2) Sebagai bahan informasi masyarakat pada umumnya yang diharapkan mampu memberikan pemahaman dari segi aspek politik, serta kesadaran bagi masyarakat umum.

D. Tinjauan Pustaka

Guna menyusun skripsi diperlukan tinjauan pustaka untuk dijadikan sebagai referensi dalam penulisan dan tentunya supaya permasalahan yang akan dibahas tidak berbenturan dengan permasalahan yang sudah pernah dibahas sebelumnya, artinya penyusun akan membahas permasalahan-permasalahan yang belum pernah ada sebelumnya. Penyusun sebelumnya meneliti lebih jauh tentang buku-buku, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang mendalami permasalahan yang akan dijadikan skripsi nantinya serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada beberapa karya ilmiah yang sudah membahas yang berkaitan dengan pendidikan politik kader di Jawa Tengah diantaranya sebagai berikut :

Pertama karya ilmiah dalam bentuk jurnal karya Rudy Hartono (2016) yang berjudul “Peran Pendidikan Politik Bagi Kehidupan Masyarakat”. Rudy Hartono mengatakan bahwa Pendidikan politik adalah upaya menyadarkan masyarakat dari belenggu yang dibuat oleh manusia bagi manusia lainnya. Dengan adanya pendidikan politik di harapkan seluruh warganegara dapat sadar dan dapat meningkatkan pengetahuannya dalam berpolitik, mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan, memaksimalkan hak mereka, melaksanakan kewajiban mereka, dan juga turut berpartisipasi dalam segala bentuk aktivitas politik.

Kedua karya ilmiah dalam bentuk jurnal karya Siti Rohmah, Iyep Candra Hermawan, dan Dina Indriyani (2020) yang berjudul “Peranan Pendidikan Politik Terhadap Pembentukan Kader Parpol Pada Partai Gerindra Di Kabupaten Cianjur”. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui peranan pendidikan politik terhadap pembentukan kader parpol di partai Gerindra. Pendidikan politik kepada kader partai merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh semua partai politik. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik mengamatkan kepada semua partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik dalam rangka mempersiapkan kader-kader

berkualitas yang memiliki integritas, tanggung jawab dan loyalitas yang diharapkan mampu berfungsi dengan baik di tengah perjuangan politik. Pendidikan politik yang dilakukan partai Gerindra dalam membentuk kader partainya yakni melalui pelatihan dan pematapan pemahaman dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Peran pendidikan politik dalam membentuk kader partai pada partai Gerindra di DPC Kabupaten Cianjur sangat berperan secara signifikan keberhasilan dari pendidikan politik tersebut dilihat dari tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai Gerindra yang telah dibuktikan dengan jumlah kursi di DPRD yang diperoleh oleh kader partai Gerindra.

Ketiga karya ilmiah dalam bentuk jurnal karya Edwin Nurdiansyah (2015) yang berjudul “Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia”. Penelitian ini dilatarbelakangi kondisi warga negara Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan politik secara maksimal, pengetahuan politik mereka masih sangat kurang sehingga hanya dijadikan komoditi politik oleh golongan tertentu. Hal ini menunjukkan pemerintah dan partai politik yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan politik perannya masih kurang maksimal. Pendidikan politik yang tidak berjalan dengan baik akan berdampak pada pelaksanaan demokrasi yang tidak efektif bahkan berpotensi menimbulkan konflik sektoral.

Keempat karya ilmiah dalam bentuk jurnal karya Sunarso (2007) yang berjudul “Pendidikan Politik Dan Politik Pendidikan”. Sunarso dalam tulisannya menjelaskan bahwa pendidikan politik belum memiliki bagian sentral dalam kurikulum. Meskipun apa yang sering disebut sebagai kurikulum dapat dikatakan telah berkontribusi pada pendidikan politik, membentuk sikap siswa terhadap otoritas dan secara implisit membentuk nilai-nilai siswa dalam hal-hal yang penting secara politik seperti keadilan sosial, kesetaraan ras dan gender, atau kesetiaan nasional. Tetapi formasi

politik seperti itu akan menyiratkan tentang eksplorasi di dalam ruang pendidikan tentang benar dan salah serta tidak melihat bahwa tindakan mereka sendiri memaksakan posisi politik tertentu sebagai salah satu yang sah untuk diikuti oleh para guru.

Pendidikan dan politik memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. politik tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, kecuali jika negara berencana untuk menghasilkan politisi buta huruf yang tidak dapat diharapkan untuk memimpin republik keluar dari krisis saat ini. Anda tidak dapat melarikan diri dari politik atau memisahkannya dari pendidikan. politik adalah cara mengelola lingkungan yang luas, dan bukan sekedar perebutan kekuasaan. oleh karena itu adalah tugas sekolah untuk membantu siswa membedakan antara politik yang baik dan politik yang buruk.

Kelima karya ilmiah dalam bentuk jurnal yang ditulis Putri Handayani Nurdin (2016) yang berjudul “Implementasi Kewajiban Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Di Kabupaten Bone Bolango”. Putri Handayani Nurdin dalam tulisannya menjelaskan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kewajiban partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Bone Bolango dan untuk mengetahui dan menganalisis model pendidikan politik oleh partai politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan melalui studi lapangan, yaitu dengan mengkaji menggunakan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual yaitu dengan mengkaji konsep-konsep terkait penelitian ini dan melakukan wawancara kepada pengurus partai politik, masyarakat, dan pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik di Kabupaten Bone Bolango belum mengimplementasikan kewajiban partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh karena model

pendidikan politik di setiap partai politik berbeda, sehingga peneliti merekomendasikan model pendidikan politik yang memperhatikan pada komunikasi politik, materi dan metode pendidikan politik, dan pemberlakuan sanksi.

Keenam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Syarifatul Aini (2019) yang berjudul “Faktor Kendala Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Kajian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”. Syarifatul Aini dalam tulisannya menjelaskan bahwa pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik. Untuk itu Pendidikan politik bagi partai politik merupakan sarana bagi penguatan dan peningkatan kualitas kader partai politik. Di tengah pertumbuhan partai politik di Indonesia, dalam perkembangannya ada kecenderungan menurunnya kualitas para kader partai yang menunjukkan perilaku tidak baik seperti korupsi, rendahnya partisipasi politik, ancaman makar, intoleransi terhadap preference politik hingga menguatkan politik identitas. Sehingga perlu adanya penguatan dan peningkatan kualitas kader melalui pendidikan politik.

Ketujuh karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang ditulis Ahmad Syaiful Ashar (2011) yang berjudul “Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat”. Ahmad Syaiful Ashar dalam tulisannya menjelaskan bahwa Pendidikan politik bagi partai politik merupakan sarana bagi penguatan dan peningkatan kualitas kader partai politik. Di tengah pertumbuhan partai politik di Indonesia, dalam perkembangannya ada kecenderungan menurunnya kualitas para kader partai baik yang duduk di pemerintahan maupun legislatif yang menunjukkan perilaku tidak baik seperti korupsi, melanggar norma kesusilaan, dan melakukan tindak pidana. Sehingga

perlu adanya penguatan dan peningkatan kualitas kader melalui pendidikan politik.

Kedelapan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Afen Sandika (2018) yang berjudul "Peran PDI Perjuangan Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Mesuji Tahun 2017". Afen Sandika dalam tulisannya menjelaskan bahwa PDI Perjuangan merupakan organisasi politik yang terbuka untuk masyarakat umum tanpa membedakan suku, ras, agama, budaya. Peran partai politik dalam hal ini adalah bagaimana memahami masyarakat dalam keterlibatan masyarakat dalam kancah politik. Meningkatnya partisipasi politik dalam pilkada di Kabupaten Mesuji bisa dikatakan berhasilnya sistem demokrasi di kabupaten Mesuji.

Kesembilan karya ilmiah dalam bentuk artikel yang ditulis oleh Slamet PH (2014) yang berjudul "Politik Pendidikan Indonesia Dalam Abad 21". Slamet PH dalam artikelnya menjelaskan bahwa arah politik pendidikan Indonesia masih mosaik dan kurang meng-Indonesia, yang ditunjukkan oleh kebijakan, perencanaan, dan penganggaran yang kurang berpijak pada bumi nusantara. Idealnya, arah politik pendidikan Indonesia harus meng-Indonesia yaitu pembangunan pendidikan yang berpijak pada Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, karakteristik, kekayaan, dan ragam kebutuhan Indonesia yaitu kebutuhan peserta didik, keluarga, masyarakat, dan berbagai sektor pembangunan dan sub-sub sektornya, selain harus mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal seraya memenuhi kebutuhan nasional dan tuntutan global. Indonesia tidak perlu kuatir terpelanting dalam era kesejagatan, asal tingkat kesiapan untuk menghadapinya memadai. Strategi politik pendidikan yang harus ditempuh untuk menghadapi abad ke-21 adalah menyeleksi nilai-nilai yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk diajarkan kepada peserta didik dan secara aktif memberikan kontribusi terhadap pembangunan pendidikan dunia.

Kesepuluh karya ilmiah dalam bentuk artikel yang ditulis oleh Ahmad Zain Sarnoto (2012) yang berjudul “Konsepsi Politik Pendidikan Indonesia”. Ahmad Zain Sarnoto dalam artikelnya menjelaskan bahwasanya kajian Politik pendidikan yang dimaksud termanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan. Politik pendidikan yang diharapkan tentunya politik pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil atau miskin. Bagaimanapun, hingga hari ini masih banyak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anak- anaknya sampai tingkat SD sekalipun. Masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas atau bahkan tidak memiliki gedung yang representatif atau tak memiliki ruang belajar sama sekali. Masih banyak sekolah yang sangat kekurangan guru pengajar. Masih banyak pula guru (honorar) yang dibayar sangat rendah yang menyebabkan motivasi mengajarnya sangat rendah.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah di atas yang sudah dianalisis, penulis belum menemukan adanya karya ilmiah yang secara khusus melakukan penelitian terkait dengan pendidikan politik bagi kader partai persatuan pembangunan di Jawa Tengah. Berikut ini adalah uraian singkat letak perbedaan antara penelitian skripsi penulis dengan masing-masing karya ilmiah di atas.

Perbedaan skripsi penulis dengan karya ilmiah yang pertama adalah pada objek penelitiannya, jika dalam karya ilmiah yang pertama melakukan penelitian terkait pendidikan politik bagi masyarakat, sedangkan dalam skripsi penulis objek penelitiannya adalah pendidikan politik bagi kader Partai Persatuan Pembangunan di Jawa Tengah. Selain itu skripsi penulis membahas tentang pola pendidikan politik yang diterapkan partai PPP di Jawa Tengah. Adapun perbedaan skripsi penulis dengan karya ilmiah yang kedua adalah pada sudut pandang yang digunakan, jika pada skripsi penulis dikaji dari sudut pandang internal partai sedangkan pada karya ilmiah tersebut dikaji dari sudut pandang eksternal(masyarakat). Perbedaan lainnya terdapat pada objek

kajiannya, jika pada karya ilmiah tersebut membahas tentang peranan partai GERINDRA dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang pola kaderisasi partai PPP. Perbedaan skripsi penulis dengan karya ilmiah yang ketiga adalah pada tujuan penelitian, jika pada karya ilmiah tersebut bertujuan untuk memaksimalkan pendidikan politik kepada masyarakat, sedangkan pada skripsi penulis bertujuan untuk mengetahui pola pendidikan politik bagi kader.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah di atas, penulis menemukan adanya kesamaan secara umum dengan pembahasan penelitian skripsi penulis, namun tidak ditemukan kesamaan pembahasan secara khusus dengan penelitian skripsi penulis. Selain itu penulis menemukan beberapa perbedaan pembahasan pada karya-karya ilmiah tersebut dengan skripsi penulis. Bertolak dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pendidikan politik bagi kader partai dan juga hambatan-hambatan dalam melaksanakan pendidikan politik bagi kader, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Metodologi Penelitian

Pengertian penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Agar dalam menyusun skripsi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan. Metode penelitian digunakan sebagai sarana untuk memperoleh data-data yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya. Pembahasan metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif mengacu pada latar belakang alamiah secara holistik, dimana instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri dan lebih mementingkan proses daripada hasil. Hasil dari penelitian kualitatif itu sendiri lebih menekankan makna daripada generalisasi Denis (2010: 123). Pendekatan ini digunakan oleh peneliti karena dengan metode ini permasalahan dapat digambarkan dengan jelas terperinci untuk mengenai pendidikan politik partai PPP bagi kader di Jawa Tengah. pendekatan penelitian ini dapat merujuk pada tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran yang komprehensif tentang pendidikan politik partai PPP bagi kader di Jawa Tengah.

Penelitian kualitatif yakni penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks pengumpulan data dengan memanfaatkan diri penulis di lapangan sebagai instrumen utama Sugiono (2015 : 8).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah salah satu strategi dan metode analisis data kualitatif yang menekankan pada kasus-kasus khusus yang terjadi pada objek analisis Bugin (2014 : 237). Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang merujuk penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata atau *real*, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui teknik pengumpulan data yang secara detail dan lebih mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen-dokumen pendukung serta berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema khusus Creswell (2014: 135).

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan objek penelitian untuk memperoleh sumber informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Peneliti juga harus terlibat dalam memperoleh sumber informasi lapangan dengan bertemu informas yang sudah ditetapkan. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui skema wawancara, observasi dari narasumber yang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh peneliti Sugiyono (2010 : 308). Data primer yang diperoleh dari kader partai PPP

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang didapatkan untuk mendukung kajian penelitian yang diteliti oleh peneliti untuk melengkapi sumber data primer. Data penelitian ini diperoleh dari karya ilmiah, jurnal ilmiah, website resmi PPP, dan catatan-catatan hasil pemilu 2019.

2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian lapangan, yakni teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber). Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Adapun yang menjadi pihak narasumber yaitu: pengurus DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah. Dalam wawancara, penulis melakukan wawancara terbuka, yaitu Subyek penelitian diberikan pertanyaan yang tidak mengikat sehingga tidak terbatas dalam memberikan jawabannya dan dapat memberikan keterangan secara bebas.

b. Observasi (*observation*)

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian. Dalam hal ini adalah kader partai persatuan pembangunan.

c. Dokumentasi (*documentation*)

Dokumentasi merupakan dokumen yang diperoleh dari pihak-pihak yang bersangkutan, baik dokumen tertulis ataupun dokumen dalam bentuk gambar foto.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini tentunya sangat dibutuhkan dengan teknik analisis data, agar data dapat disusun dengan cara sistematis. Data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan-catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengategorikan. Karena penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif maka hasil analisis datanya pun bersifat kualitatif. Analisis yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu pola yang menggabungkan data-data yang diperoleh di lapangan. Dalam pengumpulan data peneliti mencatat semua hasil data secara objektif dan apa adanya sesuai hasil wawancara dan observasi di lapangan. Dan data-data tersebut dibentuk dijadikan narasi agar mudah dipahami.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah cara merangkum data-data agar lebih mudah dalam memfokuskan hal-hal penting dalam bentuk yang relevan. Data yang telah difokuskan akan mempermudah peneliti untuk memberi gambaran yang jelas sehingga kesimpulan akhirnya dapat diverifikasi.

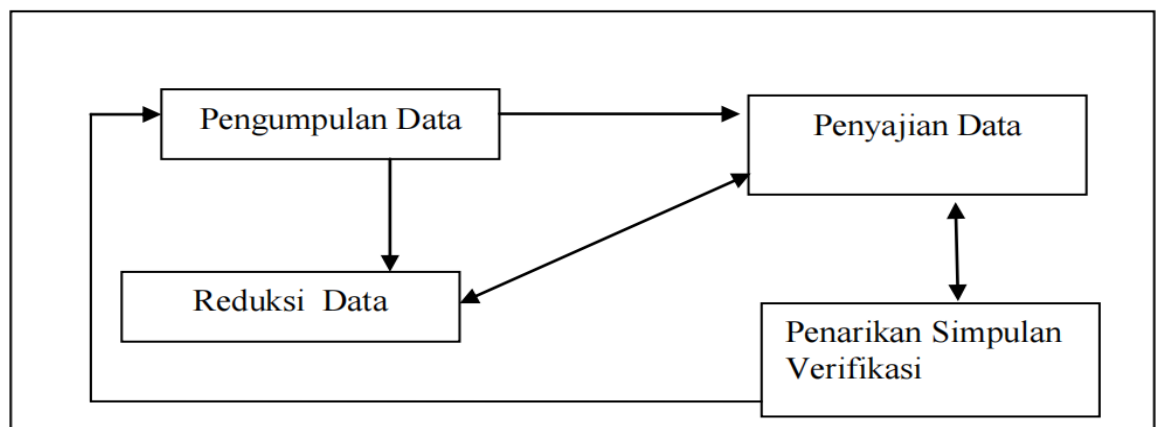
c. Penyajian Data

Data yang telah difokuskan dalam bentuk reduksi, akan disajikan data ke dalam laporan yang sudah dibuat dalam bentuk penelitian, yang akan disajikan dan dipaparkan dalam bentuk deskripsi. Teknik penyajian data yang sistematis ini, dapat mempermudah peneliti dalam bentuk kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah cara akhir untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh di lapangan, kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat peneliti sebelumnya.

Gambar 1 (Sugiyono, 2016)



F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi ke dalam enam bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori

Dalam Bab II ini akan dijelaskan secara detail terkait teori-teori yang telah digunakan didalam proposal skripsi. Dari teori-teori tersebut akan dijelaskan lebih dalam sehingga memantapkan pemahaman dari konsep teori yang akan digunakan sebagai kerangka berpikir dalam melakukan analisis dari data-data penelitian yang dilakukan.

Bab III PROFIL PARTAI PPP DAN DINAMIKA PARTAI PPP DI JAWA TENGAH

Pada Bab ini akan membahas terkait profil partai PPP dan dinamika partai PPP di Jawa Tengah.

Bab IV POLA PENDIDIKAN POLITIK PARTAI PPP BAGI KADER DI JAWA TENGAH

Dalam bab ini akan dijelaskan secara detail hasil temuan data lapangan mengenai pola yang digunakan Partai PPP dalam melaksanakan pendidikan politik bagi kader di Jawa Tengah.

BAB V FAKTOR PENGHAMBAT DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI KADER PARTAI PPP DI JAWA TENGAH

Pada bab sebelumnya dijelaskan bagaimana pola Partai PPP dalam melaksanakan pendidikan politik bagi kader di Jawa Tengah, dalam bab ini akan dijelaskan apa saja faktor penghambat partai PPP dalam melaksanakan pendidikan politik bagi kader di Jawa Tengah.

Bab VI Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis atau pembahasan yang telah dilakukan untuk menjawab pola dan faktor penghambat dalam melakukan program pendidikan politik bagi kader di Jawa Tengah yang diangkat. Disamping itu, bab ini juga memuat saran atau rekomendasi dari penulis, baik untuk kepentingan teoritis, praktis, maupun untuk penelitian lebih lanjut.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. LANDASAN TEORI

Supaya penelitian ini mempunyai landasan metodologi yang kuat dan akurat maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat dengan obyek yang akan dikaji sebagai landasannya. Adapun teori-teori yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik di Indonesia secara edukatif merupakan upaya yang sistematis untuk memantapkan kesadaran politik dan bernegara untuk menjaga kelestarian Pancasila dan UUD 1945. Jadi, pendidikan politik disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta yang menjadi landasan moral bangsa. Hal ini dapat dilihat dalam UU nomor 2 tahun 2008 tentang pendidikan politik disebutkan bahwa:

"partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila UUD 1945".

Pada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Artinya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, salah satunya merupakan bentuk pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap, dan perilaku politik sehingga yang orang yang bersangkutan memiliki pengetahuan politik, kepedulian politik, partisipasi politik, dan kemampuan mengambil keputusan

politik secara rasional yang menguntungkan bagi diri sendiri maupun bagi bangsa.

Cholisin berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan aspek dari pendidikan politik yang materinya terfokus pada peranan warga negara dalam kehidupan bernegara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Semuanya di proses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945. Sejalan dengan pendapat tersebut, Soedjiarto juga mengartikan pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik agar menjadi warga negara yang secara politik bersikap dewasa dan ikut serta dalam pembangunan sistem politik yang demokratis

Menurut Rusadi Kantaprawira, pendidikan politik berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik sesuai dengan paham demokrasi dimana rakyat harus mampu berpartisipasi politik. Bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui :

1. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan bentuk publikasi massa yang dapat membentuk pendapat umum;
2. Siaran radio dan televisi serta film yang berkaitan dengan pendidikan politik;
3. Lembaga masyarakat berupa tempat beribadah dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

Pendidikan politik menurut Alfian dapat diartikan sebagai usaha untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga mereka dapat benar-benar memahami dan menghayati nilai-nilai politik yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun. Hasil penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik ideal, serta bersamaan dengan itu lahir kebudayaan politik baru.

Perilaku politik yang lahir dari sebuah pendidikan politik dilakukan secara sadar atau tidak sadar yang dipengaruhi pula oleh interaksi sosial setiap individu. Dalam proses tersebut mengandung nilai-nilai tertentu yang secara normatif diyakini dan dilaksanakan oleh setiap individu. dalam ini Affandi (1993 : 3) menyatakan pendapatnya, "Pendidikan Politik selalu terkait tentang internalisasi nilai, yakni sebagai proses dimana individu mempelajari budaya dan menjadi bagian dari budaya tersebut sebagai unsur yang penting dari konsep dirinya). Proses internalisasi nilai-nilai ini menjadi kekuatan pendidikan politik yang memberi makna bahwa pendidikan dan politik saling berhubungan.

Pendidikan politik mencoba mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi yang akan diterapkan pada warga negara sebagai landasan pola pikir dalam membangun partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik warga negara dapat diwujudkan dalam bentuk pengambilan keputusan politik yang didasarkan pada kebebasan memilih dan menentukan keputusan yang dibuat. Hal ini senada dengan Haines, Brownhill (1989:4) bahwa upaya pendidikan politik bertujuan untuk "*free men have to decide, to chose, to elect refresentatives, support or under mine policies, advocate, persuade, guide, teach, as well as manage, their own affairs as well as they are able*".

2. Tujuan Pendidikan Politik

Pada dasarnya tujuan pendidikan politik disetiap negara berbeda-beda. Hal ini terjadi karena landasan serta tujuan pelaksanaan pendidikan politik disesuaikan dengan dasar dan falsafah bangsa. Indonesia sebagai Negara yang demokratis menjalankan proses pendidikan politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan warga negara. Sehingga tujuan pendidikan politik harus sejalan dengan penjabaran tujuan pendidikan nasional. Dalam rumusan pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dinyatakan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagai berikut: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Generasi muda sebagai pewaris cita-cita bangsa dituntut untuk berpartisipasi secara aktif membangun bangsa. Oleh sebab itu, generasi muda harus memiliki pengetahuan serta ketrampilan politik secara bertanggungjawab. Pendapat ini sejalan dengan Brownhill dan Patricia Smart(1989:4) "*The aim of political education should therefore be to develop the professionals interest and to poin the toward their political responsibilities, while at the same time endeavouring togive them the necessary knowledge and skills to carry out those responsibilities*". Dengan demikian pendidikan politik bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan untuk bertanggungjawab sebagai warga. Selain itu memberikan pemahaman mengenai pengetahuan politik yang sedang berjalan. Pelaksanaan pendidikan politik harus dilakukan secara sistematis untuk menumbuhkan iklim demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

a. Bentuk-bentuk Pendidikan Politik

Kurikulum pendidikan politik secara efektif harus membuat individu menimbulkan sikap politik sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini senada diungkapkan oleh Brownhill dan Patricia Smart(1989:110) yang mengungkapkan bahwa kurikulum pendidikan politik harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Nilai-nilai, tujuan, etika dasar serta sasaran yang dicapai, antara lain: isi kurikulum harus didasarkan kepada suatu etika yang dapat diterima oleh semua jenis dan kalangan masyarakat.
- 2) Nilai-nilai tersebut nantinya dipakai sebagai bahan untuk menyusun informasi, pengetahuan teoritis serta hal-hal yang bersifat informative dan kognitif.

3) Selain pengetahuan yang bersifat teoritis, kurikulum pendidikan politik harus mengandung seperangkat pengetahuan praaktis.

Lebih lanjut, Brownhill dan Patricia Smart(1989: 110) mengemukakan pengetahuan praktis dalam kurikulum pendidikan politik terdiri dari :

- 1) Hakekat argumen rasional, argumen deduktif, argumen induktif, serta bentuk-bentuk argumen dialektika dari argumen politik.
- 2) Argumen persuasif, yaitu bagaimana memberikan argumentasi dengan cara-cara yang dapat meyakinkan orang dan mampu mempresentasikan secara logis maupun retorik.
- 3) Penggunaan tekanan dalam perjanjian, bargaining, dan diplomasi dinamika kelompok diskusi.
- 4) Ketrampilan berkomunikasi dan menanamkan pengaruh dikalangan pengikut, ketrampilan mengembangkan argumen secara rasional maupun tertulis serta tehnik-tehnik persuasi.

Berdasarkan materi dan metode pendidikan politik diatas, dapat diketahui bahwa materi pendidikan politik yang disampaikan kepada kader dan pengurus partai politik maupun kepada masyarakat umum adalah berbeda. Metode yang digunakan dalam pendidikan politik juga berbeda dengan objeknya. Metode yang digunakan kepada kader dan pengurus partai politik adalah penyampaian yang intensif secara langsung untuk membentuk mindset mereka agar memiliki loyalitas dan integritas kepada partainya. Sedangkan metode yang digunakan kepada masyarakat dapat berupa penyampaian secara langsung maupun tidak langsung oleh partai politik. Namun pada praktiknya, penyampaian materi lebih sering dilakukan secara tidak langsung, contohnya dengan menggunakan media massa sebagai perantara.

Pendidikan politik ini harus bersumber dari aspirasi dan kepribadian rakyat Indonesia yang telah disepakati secara nasional. Beberapa karakteristik kepribadian rakyat Indonesia yang diharapkan dapat dibina lewat pendidikan politik adalah:

- 1) Sadar akan hak dan kewajiban, tanggung jawab moral dan politik terhadap kepentingan bangsa dan negara, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dengan memberikan keteladanan yang baik;
- 2) Sadar mentaati hukum dan UUD 1945, serta memiliki sikap nasionalisme yang teguh dan tidak sempit;
- 3) Aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan politik;
- 4) Aktif mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis.

Selain berdasarkan pada kepribadian bangsa Indonesia, pendidikan politik juga bersumber pada budaya politik yang berasal dari kehidupan modern dan universal yang berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, dan keterwakilan politik. Pemimpin berkuasa atas kehendak rakyat karena itu pemimpin wajib mempertimbangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya dalam membuat keputusan agar rakyat dapat turut serta berpartisipasi untuk memenuhi hak-hak politiknya.

Pendidikan politik merupakan agenda yang sangat penting bagi bangsa yang terbebas dari penjajahan. Demokrasi atau proses demokratisasi memerlukan syarat mutlak keterdidikan rakyat secara politik. Rakyat yang terdidik secara politik adalah rakyat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sehingga rakyat bisa secara otonom ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pengambilan keputusan pada suatu negara, memantau proses keputusan publik, dan melakukan advokasi terhadap akses kebijakan publik. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam proses politik maka lahirlah partai politik yang menjadi wadah bagi masyarakat dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menyebutkan salah satu fungsi partai politik adalah sebagai suatu sarana pendidikan politik bagi anggota

partai politik dan masyarakat agar menjadi warga negara yang sadar akan nilai-nilai politik suatu negara. Partai politik diharapkan dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, yang nantinya akan menambah wawasan dan pengetahuan serta pola pikir masyarakat dalam hal politik. Selain itu pendidikan politik bagi para anggota dan kader juga tidak kalah penting, hal ini menjadi sorotan utama karena yang nantinya akan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat adalah anggota dan kader partai tersebut.

Untuk mencapai efektifitas pelaksanaan pendidikan politik, program pendidikan politik perlu dilaksanakan dengan cara dan metode baru serta dengan materi yang disesuaikan dengan karakter, kebutuhan, kepentingan, dan minat, serta disesuaikan dengan tingkat pengalaman dan pemahaman mereka tentang politik. Karena dengan dilakukannya pendidikan politik di diharapkan dapat menghasilkan pemilih yang cerdas, kritis dan bertanggungjawab.¹⁷²

Secara umum tujuan dari pendidikan politik adalah untuk membentuk sikap yang mendukung sistem politik dan untuk menyadarkan individu akan perannya sebagai partisipan dalam kehidupan politik. Pendidikan politik harus dapat membuat rakyat mampu memahami situasi sosial politik yang penuh konflik, berani memberikan kritik yang membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mampu, sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.

BAB III
PROFIL PARTAI PPP DAN DINAMIKA POLITIK PARTAI PPP DI
JAWA TENGAH

A. SEJARAH PARTAI PPP

PPP – Partai Persatuan (PPP) merupakan salah satu partai politik di Indonesia. PPP didirikan pada tanggal 5 Januari 1973 yang merupakan hasil Fusi atau gabungan dari empat partai berbasis Islam yakni Partai Nahdhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Partai ini dipelopori oleh KH Idham Chalid (Ketua Umum PB NU), H.Mohammad Syafaat Mintaredja (Ketua Umum Parmusi), SH, Haji Anwar Tjokroaminoto (Ketua Umum PSII), Haji Rusli Halil (Ketua Umum Perti), dan Haji Mayskur (Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di DPR). Dengan hasil gabungan dari partai-partai besar berbasis Islam, maka PPP telah memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam”.

Awal berdiri PPP menerapkan asas Islam dengan lambang Kabah. Namun sejak tahun 1984, PPP menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sistem politik yang berlaku saat itu, ini disebabkan karena adanya tekanan politik dalam kekuasaan Orde Baru. Selanjutnya PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dengan lambang bintang dalam segi lima berdasarkan Mukthamar I PPP tahun 1984. Dalam perjalannya, PPP kembali menggunakan asas Islam dengan lambang Kabah sejak tumbang-nya kekuasaan Presiden Soeharto tahun 1998 berdasarkan kesepakatan dalam Mukthamar IV akhir tahun 1998. PPP berkomitmen untuk terus menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, meskipun partai menggunakan asas Islam.

PPP melantik ketua umum-nya yang pertama pada periode 5 Januari 1973 hingga tahun 1978. Ketua umum pertama partai yakni H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH. Hingga selanjutnya ketua umum partai secara berturut-turut antara

lain H. Jailani Naro, SH, H. Ismail Hasan Metareum, SH, H. Hamzah Haz dan yang terbaru adalah H. Suryadharma Ali yang terpilih melalui Mukttamar VI yang diadakan pada tahun 2007, selanjutnya pada Mukttamar VIII 2016 Romahurmuziy (Gus Romy) terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum DPP PPP, dan saat ini PPP dipimpin oleh Suharso Monoarfa yang terpilih pada Mukttamar IX di Kota Makassar.

Visi PPP adalah, “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai ke-Islaman”.

PPP mempunyai platform yang dibagi dalam beberapa bidang, yakni agama, politik, ekonomi, hukum, sosial, pengetahuan dan keterampilan, dan pendidikan. Dalam bidang agama, PPP mengedepankan peran agama sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan negara dengan hubungan yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara. Hal ini diwujudkan dengan sikap saling toleransi antar umat beragama. Dalam bidang politik, PPP terfokus dalam aspek penguatan ke-lembagaan, mekanisme dan budaya politik yang ber-demokratis dan ber-akhlaq karimah demi meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), serta menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi. Selanjutnya dalam bidang ekonomi, PPP lebih menekankan pada konsep ekonomi kerakyatan. Menegakkan supremasi hukum akan selalu dijunjung tinggi oleh PPP dengan ikut serta dalam upaya pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), penguatan institusi dan instrumen penegak hukum serta selalu ikut aktif dalam pembaharuan hukum nasional.

Dalam sektor sosial, PPP selalu berkomitmen untuk terus mewujudkan kehidupan sosial yang religius dan bermoral dengan menghilangkan budaya kekerasan dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya. Kemudian dalam bidang pengetahuan dan keterampilan, PPP ikut membantu demi terbentuknya manusia yang

berkualitas dan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan.

Dibawah Kepemimpinan Suharso Monoarfa, PPP bertekad menawarkan jalan keluar dalam pembangunan yang berkeadilan di Indonesia. yang dirumuskan secara sederhana tetapi penuh yaitu makna, “**Merawat Persatuan dengan Pembangunan**”. Pembangunan yang dimaksud PPP adalah ikhtiar memenuhi hak-hak rakyat untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. Pembangunan jalan menuju Tanah Air yang kita impikan: *Baldlatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*. Gemah ripah loh jinawi. Pembangunan dengan jalan menggapai kesejahteraan dalam keadilan dan berkeadilan dalam berkemakmuran, untuk terwujudnya masyarakat adil makmur.(ppp.or.id)

B. VISI/MISI PPP

Visi

Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati diri di atas, maka visi PPP adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”.

Di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang; Perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlaqul karimah dengan prinsip amar makruf nahi munkar; Pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan; Paradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan, dan Komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama.

Sementara itu di bidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlakul karimah. PPP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya good and clean government, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan BUMD, dan mendorong peningkatan keswadayaan nasional (unit usaha keluarga/individual, usaha swasta, badan usaha negara dan koperasi) demi terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.

PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi berkonstitusi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pembaruan hukum nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat, penguatan institusi dan instrumen penegak hukum, serta penguatan moralitas penegak hukum.

PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya rasa aman masyarakat, mencegah segala upaya marjinalisasi dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama agama maupun modernitas dan pembangunan, mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etik, moral dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.

PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas kesehatan

yang baik. Program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangunan kesejahteraan, yang darinya diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdas, trampil, mandiri dan berdaya saing tinggi. Visi politik luar negeri PPP diorientasikan pada upaya mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif memajukan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan, menolak ketergantungan terhadap pihak luar manapun yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia, memelihara persahabatan antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain atas dasar saling menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil, beradab dan dengan prinsip keseimbangan.

Misi

PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.

PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal ika.

PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridloi oleh Allah SWT, baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

C. LOGO PPP

Gambar II



1. Beragam hijau menyatu ke dalam bulatan putih, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basariyah.
2. Ikat kepala merah putih, ukhuwah wathoniyah, cinta dan berjuang untuk kemaslahatan NKRI.
3. kakbah: ukhuwah islamiyah, sebaik-baik umat adalah yang menegakkan kebenaran dan mencegah kebathilan (amar ma'ruf nahi munkar), dan beriman kepada Allah.
4. Merawat Persatuan dengan Pembangunan merupakan sublimasi dari 6 prinsip perjuangan dan 5 visi partai.

D. PEDOMAN PARTAI PPP

5 khidmat dan 6 prinsip perjuangan

PPP – Dalam mewujudkan cita-citanya PPP memiliki misi perjuangan yang tercermin dalam lima khidmat 6 prinsip perjuangan sebagai berikut:

1. Khidmat Pertama, PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, dan mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme, marxisme, leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.

PPP berpendapat bahwa Islam adalah syari'at terakhir yang diturunkan Allah SWT di muka bumi. PPP menginginkan terwujudnya umat Islam Indonesia yang beriman kepada Allah SWT semata. Tidak sedikitpun ada sekutu untuk mengimani-Nya. Sebab itu menurut PPP sila pertama Pancasila "Ketuhanan yang Maha ESA" bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hilangnya tujuh kata dari sila pertama naskah Piagam Jakarta

sejatinya bukanlah suatu bentuk kekalahan perjuangan umat Islam dalam perumusan dasar Negara. Penghapusan kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”, menjadi “Yang Maha Esa” adalah konsep ketuhanan atau tauhid yang sangat Islami. Kata “Ketuhanan yang Maha ESA” identik dengan arti Tuhan yang Tunggal (Satu), dan tidak ada peluang keberbagaian Tuhan sebagaimana konsep ketuhanan selain Islam.

Dari khidmat yang pertama ini, PPP memandang bahwa pendirian Negara Islam bukanlah tujuan PPP, karena bagi PPP dasar Negara Pancasila dan NKRI sudah final. Pada konteks ini PPP berjuang agar masyarakat Islam Indonesia dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara kaffah, sehingga kesejahteraan lahir dan batin terwujud.

2. Khidmat Kedua, PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi diskriminasi, dan budaya kekerasan.

Khidmat ini sesuai dengan sila kedua Pancasila: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Dalam menjalin hubungan sesama manusia (hablumminannas) harus adil dan beradab, sehingga bisa hidup berdampingan, aman, dan sentosa bersama manusia yang lain.

3. Khidmat Ketiga, PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengem-bangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan, dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Khidmat perjuangan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa ini sesuai dengan sila “Persatuan Indonesia”. Untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa kita harus bisa mewujudkan kebersamaan, bahu-membahu dan hidup rukun, sebagai wujud keserasian dan keselarasan dalam masyarakat yang merupakan nilai-nilai nasionalisme serta menjadi faktor pendukung untuk mencapai kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia.

4. Khidmat Keempat, PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat.

Khidmat keempat ini selaras dengan prinsip “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Prinsip ini merupakan serapan dari nilai-nilai Islam yang mengajarkan kepemimpinan yang adil, yang memperhatikan kemaslahatan rakyatnya, dan dalam menjalankan roda kepemimpinan melalui musyawarah dengan mendengarkan berbagai pandangan terbaik untuk mencapai kemufakatan agar bermanfaat bagi kehidupan bersama.

5. Khidmat Kelima, PPP berkhidmat memperjuangkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT, *baladun thayyibatun wa rabbun ghofur*. PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Khidmat kelima ini memiliki makna yang sama dengan prinsip “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku pada masyarakat dalam segenap bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Artinya, setiap rakyat Indonesia berhak

mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, maupun kebudayaan. Prinsip ini mengandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara dan nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).

Enam Prinsip Perjuangan PPP

PPP Dalam memperjuangkan cita – cita politik nya. PPP senantiasa memegang prinsip – prinsip dasar perjuangan yang sekaligus merupakan kerangka nilai yang membingkai setiap langkah segenap jajaran partai. Prinsip – prinsip dasar yang di maksud meliputi :

1. Pertama, Prinsip Ibadah, PPP dalam perjuangan politiknya selalu berupaya mendasarinya dengan prinsip ibadah. Perjuangan yang didasarkan pada prinsip beribadah dalam arti yang seluas-luasnya adalah untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Dengan demikian, kegiatan berpolitik seluruh jajaran Partai seyogyanya merupakan keterpanggilan untuk beribadah.
2. Kedua, Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, PPP mendasarkan perjuangannya atas prinsip menyeru dan mendorong untuk melaksanakan segala perbuatan yang baik serta mencegah segala perbuatan yang tercela. Prinsip ini juga menjadi landasan perjuangan dalam melaksanakan fungsi untuk menyerap, menampung, menyalurkan, memperjuangkan, dan membela aspirasi rakyat dan melaksanakan pengawasan atau kontrol sosial, baik melalui parlemen atau advokasi lapangan.

Dengan prinsip ini PPP berusaha mendorong budaya kritis dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak terjadi apa yang disebut political decay (pembusukan politik) yang disebabkan oleh sikap membiarkan kemungkaran yang dapat merusak tatanan bermasyarakat secara keseluruhan.

3. Ketiga, Prinsip Kebenaran, Kejujuran dan Keadilan, Perjuangan PPP selalu didasarkan pada penegakan dan pembelaan prinsip kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan prinsip

kebenaran ini, perjuangan partai mengarah pada perlawanan terhadap kebatilan, karena kebenaran berhadapan secara diametral dengan kebatilan.

Meskipun demikian, kebenaran yang menjadi prinsip perjuangan PPP bukanlah kebenaran yang mutlak. Hanya Allah SWT yang Maha Benar. Karena itu, sepanjang kebenaran itu masih bersifat manusiawi, kebenaran itu bukanlah monopoli siapapun. Selanjutnya adalah prinsip kejujuran atau amanah yang bersifat sentral dan esensial dalam perjuangan PPP. Dengan prinsip kejujuran, perjuangan dalam bentuk apa pun, akan menjamin tegaknya saling pengertian, keharmonisan, keserasian, dan ketenteraman. Prinsip kejujuran ini merupakan syarat utama penunaian amanah dan kepercayaan rakyat yang perlu terus dijaga, sehingga terhindar dari perbuatan yang mengkhianati amanah rakyat. Dengan kejujuran yang menjadi landasan perjuangan, PPP akan mendapat kemenangan yang besar.

Selain prinsip kebenaran dan kejujuran, PPP akan tetap mempertahankan dan memperjuangkan nilai keadilan di dalam tiap gerak langkah perjuangannya. Tegaknya keadilan (justice) adalah esensial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan prinsip keadilan maka segala aturan dapat terlaksana dan berjalan baik, sehingga dapat menimbulkan keharmonisan, keserasian, keseimbangan, ketenteraman, dan sekaligus akan menghilangkan kedzaliman, kesenjangan, keresahan, dan konflik.

4. Keempat, Prinsip Musyawarah, PPP berpandangan bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa yang perlu terus ditumbuhkembangkan. Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai, dan menjamin kemantapan hasilnya serta menumbuhkan tanggungjawab bersama, sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata. Di samping itu, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah SWT.

Apabila dengan musyawarah tidak dapat dicapai mufakat, maka tidak tertutup kemungkinan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, namun harus dicegah adanya diktator mayoritas.

5. Kelima, Prinsip Persamaan, Kebersamaan dan Persatuan, PPP mendasarkan perjuangannya atas dasar prinsip persamaan derajat manusia di hadapan Allah SWT. Ini adalah keyakinan yang mendasar, yang memberikan motivasi perjuangan kepada seluruh jajaran partai, sehingga terhindar dari bahaya kultus individu dan neo-feodalisme yang dapat memerosotkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sedangkan dengan prinsip kebersamaan, PPP berjuang untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan dalam memikul beban dan tanggung jawab kenegaraan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan secara proporsional, sehingga terhindar dari dominasi, perasaan ditinggalkan dan dikucilkan. Di samping itu, perjuangan PPP juga didasarkan atas prinsip menegakkan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga terhindar dari bahaya disintegrasi dan perpecahan.

PPP berprinsip bahwa persamaan, kebersamaan, dan persatuan adalah nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi dan harus berjalan seimbang. Keberhasilan perjuangan partai dalam membawa bangsa Indonesia menuju pencapaian cita-cita nasional akan dapat terwujud dengan terlaksananya prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan secara partisipatoris. Karena itu, prinsip ini perlu dipelihara terus menerus serta diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata dalam memikul beban dan tanggung jawab untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih cerah di masa mendatang.

6. Keenam, Prinsip Istiqomah, PPP menjadikan prinsip istiqamah atau konsistensi menjadi prinsip perjuangan. Dengan istiqamah sebagai nilai-nilai dasar perjuangan Partai, maka keberhasilan perjuangan akan dapat dicapai. Prinsip istiqamah akan terus ditegakkan dan dimantapkan sebagai perjuangan

Partai dalam konteks perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita nasional.
(ppp.or.id)

E. STRUKTUR PENGURUS DPW PARTAI PPP JATENG

Ketua : H. MASRUHAN SAMSURIE
Wakil Ketua : M NGAINIRRICHADL, S.HI
Sekretaris : dr. Hj. SHOLEHA KURNIAWATI
Anggota : - H. ABU NAFI
 : - H. NURUL FURQON, SE
 : - Hj. NURUL HIDAYAH, M.Si
 : - INNA HADIANALA, SE
 : - H. ABDUL AZIZ, S.Ag, M.Si
 : - MUHAMMAD SHIDQI

F. DINAMIKA POLITIK DPW PPP JAWA TENGAH

Roda paertai politik pada dasarnya selalu melaju cepat untuk mewujudkan cita--cita partai. Partai Persatuan Pembangunan sendiri merupakan salah satu partai tertua di Indonesia yang masih tetap eksis dan terlibat proses demokrasi di Indonesia. 41 (empat puluh satu) tahun lalu para ulama' dan tokoh-tokoh Islam bersepakat untuk bersatu dan bergabung dalam wadah perjuangan Partai Persatuan Pembangunan. Sebagai salah satu Partai yang memiliki sejarah panjang dibanding partai-partai politik islam lainnya, PPP memiliki keunggulan sebagai modal dasar perjuangan, yaitu latar belakang historis sebagai fusi politik penerus perjuangan empat partai islam. Fusi ini tidak hanya menjadi dokumen historis, tapi juga merupakan kekuatan strategis yang tetap aktual untuk menyatukan sikap perjuangan politik umat. Dengan keberagaman dari 4 (empat) aliran yang sekaligus menjadi awal berdirinya Partai PPP selain menjadi nilai tambah bagi PPP karena latar belakang historisnya yang kuat tetapi juga menjadi penyebab munculnya konflik ditubuh PPP. Menurut Soerjono Soekanto, "Konflik adalah sebuah

proses sosial individu-individu atau kelompok individu berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan”. Jika dikaitkan dengan PPP sendiri maka corak dari masing-masing aliran memungkinkan untuk menimbulkan adanya perbedaan kepentingan, rivalitas, dan konflik-konflik sendiri. Hal ini jelas akan terjadi, karena masing-masing partai bisa mempunyai *interest* atau tujuan yang mungkin saling bertentangan. Awal mula timbulnya konflik ditubuh PPP sendiri sudah ada sejak masa orde baru.

Dalam konteks pesta politik tahun 2019 partai PPP menghadapi badai konflik yang sangat serius didalam tubuh partai PPP. Badai politik yang dihadapi PPP sebelum terlaksananya kontestasi politik tahun 2019 memberikan dampak yang signifikan didaerah-daerah yang berpartisipasi dalam pemilu serentak, salah satu daerah yang memiliki dampak badai politik yang dialami internal partai PPP adalah Jawa tengah. Kasus jual beli jabatan yang dilakukan Ketua umum Partai PPP Roma Hurmuziy (Gus Romi) terkait jual beli jabatan membuat kepercayaan public kepada partai menurun. Meski dalam konteks pemilu serentak yang terlaksana di Jawa Tengah hanya keterlibatan pemilihan legislatif, namun dalam pelaksanaanya branding personal menjadi calon anggota dewan yang akan duduk di Parlemen agak sulit karna kepercayaan publik menurun terhadap partai. Partai sebagai kendaraan membawa pengaruh besar dalam proses pemilihan lagislatif. Bapak richard dalam proses wawancara mengatakan bahwasanya :

“Tertangkapnya Roma Hurmuziy sebagai ketua umum Partai PPP dalam kasus jual beli jabatan di Kementrian agama membawa dampak didalam tubuh PPP disebagian wilayah Jawa Tengah. Ditambah lagi kasus pilkada DK yang dilaksanakan tahun 2017I, partai PPP yang berkoalisi dengan PKS menggiring stigma masyarakat bahwasanya PPP sebagai

partai islam radikal menambah deretan konflik ditubuh partai PPP”.

Secara tidak langsung, meskipun konflik itu lahir diluar DPW Jawa Tengah namun membawa dampak keberbagai pelosok negeri. DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara memiliki pengaruh besar dalam perpolitikan kancan nasional, sehingga meskipun konflik itu timbul dari Ibukota, didaerah-daerah dapat merasakan dampaknya. Bapak richard menambahkan :

“Meskipun Partai PPP dari periode ke-periode ada konflik internal, yang terpenting dalam kontestasi politik bagaimana strategi penguatan kader didalam tubuh partai menjadi sangat penting”.

Terbukti dalam kontestasi pemilu serentak yang berlangsung tahun 2019, DPW PPP Jawa Tengah mampu bersaing dalam kontestasi pesta politik, tepatnya pemilihan legislative. Menambahnya kursi parlemen yang didapatkan partai PPP di Jawa Tengah tidak lepas dari strategi internal partai dan juga penguatan kader ditubuh partai PPP. Terbukti dalam pemilihan legislative (pileg) Partai PPP mampu mendapatkan 9 (Sembilan) kursi yang sebelumnya hanya mendapatkan 8 (delapan) kursi.

BAB IV
PENDIDIKAN POLITIK YANG DILAKUKAN PARTAI PPP DI JAWA
TENGAH

A. PENGERTIAN PENDIDIKAN POLITIK

Alfian dalam jurnal Nasiwan menyatakan bahwa pendidikan politik dimaknai sebagai usaha yang terencana, dengan sadar untuk memberikan penyadaran kepada warga negara yang sudah berhak memilih. Tujuan dari pendidikan politik yang terpenting adalah membentuk kesadaran warganegara tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan konstitusi. Pendidikan politik merupakan faktor penting bagi terbentuknya sikap politik warganegara yang mendukung berfungsinya sistem pemerintahan secara sehat. Pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak di bangun (Alfian dalam jurnal Sunarso).

Melalui pendidikan politik individu diajarkan bagaimana mereka mengumpulkan informasi dari berbagai media massa, diperkenalkan mengenai struktur politik, lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga pemerintahan (Almond dan Verba dalam jurnal Sunarso). Beberapa definisi mengenai pendidikan politik adalah sebagai berikut:

1. pendidikan politik adalah bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik.
2. pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

3. R. hayer menyebut pendidikan politik ialah usaha membentuk manusia partisipan yang bertanggung jawab dalam politik. (Kartini Kartono, 2009:64).

Jadi pendidikan politik itu adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terencana, bisa bersifat formal maupun nonformal, dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi, agar warganegara mau berpartisipasi dalam politik, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Dalam filosofi pendidikan, belajar merupakan sebuah proses panjang seumur hidup. Artinya pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Hal ini diperlukan mengingat semakin kompleksnya masalah-masalah politik. Bapak Richard mengungkapkan bahwa:

“pendidikan politik dimaknai sebagai usaha yang terencana, dengan sadar untuk memberikan penyadaran kepada warga negara yang sudah berhak memilih”.

Berbeda dengan pendapat Bapak Masruhan, yang mengatakan :

“pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan bangsa dan bernegara”.

Manfaat pendidikan politik dapat melatih warganegara agar meningkatkan partisipasi politiknya. Huntington dalam jurnal Nasiwan mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara (*private citizen*) yang

bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Definisi ini mensyaratkan bahwa yang tercakup dalam partisipasi politik adalah kegiatan, dengan demikian orientasi-orientasi para warga negara terhadap politik, pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai politik kompetisi dan keefektifan politik, persepsi-persepsi tentang relevansi politik, itu seringkali juga tidak berkaitan.

A. Bentuk-bentuk pendidikan politik

Pendidikan politik tidak akan terlaksana tanpa adanya penyelenggaraan yang dilakukan secara nyata di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan politik tentunya akan berkaitan erat dengan bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat tersebut. Dengan demikian, bentuk pendidikan politik mana yang akan diterapkan dalam mendukung terlaksananya pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintahan suatu Negara, pada umumnya pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di dalam sebuah Negara.

Pendidikan politik dapat diberikan melalui berbagai jalur. Pemberian pendidikan politik tidak hanya dibatasi oleh lembaga seperti persekolahan atau organisasi saja. Namun dapat diberikan melalui media, misalnya media cetak dalam bentuk artikel. Semua bentuk pendidikan politik sebenarnya tidak jadi persoalan, artinya semuanya baik asalkan mampu memobilisasi simbol-simbol nasional sehingga pendidikan politik tersebut dapat merubah individu yang memiliki kecintaan terhadap bangsanya atau memiliki rasa keterikatan diri (sense of belonging) yang tinggi terhadap bangsa Negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Richard, beliau mengatakan :

“Pendidikan politik yang ada di PPP itu terbagi menjadi 2, yaitu pendidikan politik formal dan nonformal.”

Dimana pendidikan politik formal yaitu menjalankan program partai atau yang sudah direncanakan dalam program kerja, dan nonformal yaitu pendistribusian kader”. Program pendidikan formal yang diterapkan di PPP sifatnya berjenjang, dimulai dari tingkat dasar yang dilakukan tingkat DPC(kabupaten/kota), kemudian tingkat DPW yaitu LKKM (latihan kepemimpinan kader madya) yang dilakukan tingkat provinsi, dan kemudian dilanjut ke tingkat nasional atau DPP yaitu LKKU (latihan kepemimpinan kader utama).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak Masruhan Samsuri sebagai ketua DPW, beliau mengatakan:

“pendidikan politik atau pendidikan kader yang diterapkan di DPW PPP dibagi dua, yaitu pendidikan formal dan nonformal”.

Pendidikan nonformal pada dasarnya yaitu pendidikan politik yang tidak terprogram atau sesuai program kerja yang sudah direncanakan. Dalam upaya melatih atau bisa dikatakan pengenalan secara tidak langsung dalam dunia politik secara praktek dan juga membentuk kader. Proses kaderisasi nonformal biasanya dilaksanakan oleh masing-masing DPC dan Sayap Partai yang berada dilingkungan Jawa Tengah. Bapak Richard mengatakan :

“Bentuk pendidikan politik nonformal yang diterapkan PPP dan itu memang biasa dilakukan yaitu distribusi kader ke-instansi (DPC), untuk selebihnya biasanya diskusi-diskusi sesuai isu-isu politik terkini”.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak Masruhan :

“pendidikan nonformal pasca mengikuti pendidikan formal biasanya kader-kader dilibatkan dalam setiap-setiap kegiatan yang dilakukan DPW PPP”

Pendidikan politik memang telah menjadi rutinitas dalam tiap tahunnya, meskipun dalam hal ini pendidikan politik belum bisa dilaksanakan serentak untuk seluruh Jawa tengah. Dalam setiap program pendidikan politik juga ditandai dengan adanya sertifikasi bagi kader-kader yang lulus mengikuti kegiatan pendidikan politik. Tujuan adanya sertifikasi dalam setiap kegiatan pendidikan politik formal yaitu bisa dengan mudah membedakan jenjang kaderisasinya dan juga sebagai syarat untuk lanjut ke jenjang berikutnya.

Dalam pelaksanaan pendidikan politik untuk wilayah DPW Jawa Tengah yaitu meliputi Kabupaten/kota dan juga sayap partai yang dinaungi Partai PPP yang berada dilingkungan Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya pendidikan politik di DPW Jawa Tengah dibagi menjadi 6(enam) karisidenan. Hasil dari wawancara dengan bapak Richard, beliau mengatakan:

Dalam pelaksanaannya pendidikan politik di DPW Jawa tengah dibagi menjadi 6 karisidenan(semarang raya, Pati raya, Surakarta, Kedu raya, Banyumas, dan Tegal).

Namun meskipun demikian, pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan tidak secara bersamaan tidak menghambat jalannya proses pendidikan politik. Adapun alasan DPW PPP Jawa Tengah membagi proses pendidikan politik berbasis karisidenan yaitu dengan mempertimbangkan kultur masyarakat dan juga budaya yang berada dilingkungan masyarakat itu sendiri. Dengan begitu substansi kegiatan yang ingin dicapai tetap terwujud yaitu melakukan proses deideologisasi bagi kader dalam kegiatan pendidikan politik.

Untuk tetap berjalanya kegiatan dalam setiap kegiatan dalam proses pendidikan politik tentunya di support dengan SDM(sumber daya manusia) yang berada dalam lingkungan DPC dan juga sayap-sayap partai yang berada dalam lingkungan Jawa Tengah. Hal ini disampaikan langsung oleh bapak Richard ketika melakukan wawancara, beliau mengatakan bahwasanya:

“Dalam setiap kegiatan politik di DPW PPP Jawa Tengah yang dibagi dalam 6 karisidenan itu dalam setiap pelaksanaan setidaknya diikuti oleh 50-70 peserta dengan rincian setiap DPC dan juga sayap-sayap partai mendelegasikan 5 orang setiap instansi”.

Hal ini mampu mendorong kader-kader untuk Memahami makna politik, sejarah partai dan juga ideologi partai PPP. Statmen ini diungkapkan oleh bapak Richard, beliau mengatakan:

“Dalam pendidikan politik kader-kader lebih diarahkan terkait pemahaman politik, sejarah partai dan penanaman ideology partai”

Kegiatan rutin dilakukan PPP dalam upaya pengembangan kader bersifat aktif, artinya dalam setiap kegiatan kader dipacu untuk bertanya jawab, mempresentasikan dan juga pengembangan argumen terkait materi-materi yang disampaikan ketika kegiatan politik sehingga kader dapat mengembangkan nalar kritis. Prosesnya dalam setiap kegiatan kader akan dibagi kelompok dan kemudian dipresentasikan.

Menelisik dari proses pendidikan politik yang setiap tahunya dilakukan DPW PPP .mengarahkan kepada penanaman sikap politik,

penanaman ideology partai kepada kader. Pendidikan politik semacam ini telah memenuhi unsur-unsur yang telah diungkapkan oleh Robert Brownhill dan Patricia Smart yang mengatakan bahwa pendidikan politik harus memenuhi unsur-unsur nilai dan tujuan. Hal ini bisa dilihat dari materi-materi yang ditekankan dalam proses pendidikan politik terkait penanaman ideology partai yang berlandaskan Islam. materi semacam itu telah memenuhi standar untuk membangun etika dan juga moral kader yang berintegritas.

B. MATERI PENDIDIKAN POLITIK

Firmanzah dalam Labolo, Muhadam (2015) telah mengungkapkan bahwa, setiap partai pasti memiliki program pendidikan untuk kader-kader nya demi kemajuan partai. Adanya pendidikan politik kader merupakan program wajib bagi setiap partai karena hal tersebut, termasuk di dalam serangkaian program partai untuk mencetak kader yang berkualitas. Orang-orang yang mengikuti pendidikan di dalam partai tidak sembarang orang dapat di ikutkan, namun harus melalui seleksi dan delegasi dari internal partai terlebih dahulu (Internal PPP). Pendidikan politik bagi kader ini memang sangat diinginkan bagi banyak orang untuk mendapatkan satu tingkat jabatan di dalam partai tersebut yaitu kader dasar yang biasa disebut sebagai kader muda. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Richard selaku kader madya PPP sependapat dengan Firmanzah dalam Labolo, Muhadam. (2015) adalah sebagai berikut.

“Kader dasar adalah kader dalam tingkatan terendah, kader madya adalah tingkat menengah dan kader utama adalah masuk dalam tingkatan kader paling tinggi di dalam partai PPP“.

Pendidikan politik kader madya ini juga hanya bisa diikuti oleh orang-orang yang sudah menjadi pengurus minimal di DPC PPP karena orang luar

tidak diperbolehkan mengikuti tanpa adanya delegasi tertentu seperti yang dikatakan oleh bapak Masruhan sebagai kader utama PPP sebagai berikut.

“Orang luar tidak bisa mengikuti program pendidikan tersebut karena didalamnya juga terdapat rahasia partai yang tidak bisa menjadi konsumsi publik”.

Mengenai materi yang diberikan selama pendidikan kader madya, merupakan berasal dari internal partai PPP sendiri. Menurut bapak Masruhan materi yang pendidikan kader madya meliputi antara lain sebagai berikut.

1. Materi ideologi

Materi ideologi merupakan materi yang menekankan pada sebuah keyakinan dan ilmu tentang gagasan yang diyakini kebenarannya. Karena pendidikan madya merupakan pendidikan kader pada tingkat menengah, maka materi yang di pelajari oleh kader adalah materi ideologi partai dan ideologi pancasila.

2. Organisasi

Materi organisasi merupakan materi yang mempelajari mengenai jalannya sistem pengorganisasian di dalam partai, terutama di partai PPP. Banyak sistem pengorganisasian di dalam PPP, untuk itu pada pendidikan madya materi organisasi partai di pelajari secara mendalam. Karena tingkatan mereka sudah menengah. jadinya materi yang dipelajari harus lebih mendalam.

3. Teknik Penggalangan

Teknik penggalangan merupakan teknik dimana, seorang kader yang ada di dalam partai PPP nantinya diharapkan mampu menggalang suara aspirasi dari masyarakat. Salah satu penerapan teknik penggalangan adalah dapat menyerap suatu informasi di lingkungan sekitar mengenai apa yang di inginkan oleh masyarakat

untuk di berikan sebuah solusi dalam mengatasi fenomena permasalahan tersebut.

4. Sejarah Partai

Sejarah partai PPP merupakan materi yang penting untuk pendidikan politik tingkat menengah. Pada materi sejarah partai ini, materi disampaikan lebih mendalam sesuai tingkatan pendidikannya di dalam internal partai. Sebagai partai islam Partai PPP menyampaikan materi sejarah keislaman, yakni terkait sejarah dimulai dari masa Rosulullah SAW, kemudian dilanjut pada masa khulafaur rasyidin, dan hingga pada masa sekarang.

C. METODE PENDIDIKAN POLITIK

Upaya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan kepada kader, agar PPP memiliki kader yang mempunyai jiwa militan dan kritis terhadap permasalahan partai maupun permasalahan bangsa ini. Tentunya penerapan strategi serta upaya yang selama ini dilakukan bertujuan demi terwujudnya visi dan misi partai (PPP). Strategi yang dimaksud adalah peran PPP dalam membentuk kader selama proses pendidikan kader Madya. Pendapat tersebut memang telah sesuai dengan apa yang telah di katakan oleh bapak Richad dan bapak Masruhan ketika peneliti melakukan proses wawancara. PPP berharap agar kader yang telah mengikuti proses pendidikan kader Madya, semakin loyal dan militan ketika mendukung kebijakan dari PPP.

Selain penyampaian materi pendidikan politik, PDIP juga menerapkan beberapa metode selama proses pendidikan kader menengahnya (pendidikan kader Madya). Berdasarkan Firmanzah dalam Labolo (2015) Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada kader dan pengurus partai adalah penyampaian yang intensif secara langsung untuk membentuk "*mindset*" kader, agar memiliki loyalitas dan integritas kepada partainya.

Metode yang digunakan PPP untuk menyampaikan materi kepada kader dapat berupa penyampaian secara langsung maupun tidak langsung. Namun pada praktiknya, penyampaian materi kepada kader lebih sering dilakukan secara langsung ketika melaksanakan proses pendidikan kader. Sehingga dalam penyampain informasi dan pemberian materi akan berjalan lebih efisien.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, penemuan pertama yaitu ada beberapa metode di dalam penyampaian pendidikan kader Madya PPP. Metode tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam organisasi internal PDIP juga sependapat dengan apa yang dikatakan Firmanzah dalam Labolo, Muhadam. (2015). Mengenai penyampaian metode pendidikan kader Madya PPP adalah sebagai berikut.

1. Metode Classroom

Model kaderisasi kelas merupakan model kaderisasi berjenjang berupa pemberian materi kepada para anggota PPP. Kaderisasi dalam lingkup kabupaten atau kota yang dilakukan DPC yaitu kaderisasi tingkat Dasar, di tingkat provinsi yaitu DPW dilakukan kaderisasi tingkat Madya, dan pada tingkat paling atas dilakukan kaderisasi tingkat Utama yang dilakukan oleh DPP pada tingkat nasional. Penyampain metode kelas/classroom lebih kepada penguatan basic atau materi di dalam partai PPP.

2. Metode Andragogi

Partai Persatuan Pembangunan juga menerapkan kaderisasi dengan sistem andragogi. Kaderisasi ini lebih terfokus pada kinerja kader di lapangan dalam menjalankan program partai. Model kaderisasi PPP dengan sistem andragogi dibagi menjadi tiga yaitu kemampuan melaksanakan program partai, kemampuan kader ketika menghimpun suara masyarakat ketika membantu dilapangan dan juga kecakapan.

3. Metode Diskusi

Partai Persatuan Pembangunan juga dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman terkait dunia politik di ajak untuk melakukan diskusi-diskusi terkait isu-isu politik terkini. Pendidikan politik semacam ini dilakukan untuk meningkatkan nalar kritis kader sehingga ketika nanti duduk di parlemen kader mampu mengatasi konflik yang ada di masyarakat. Selain itu juga dalam diskusi kader partai juga mampu menjalankan tugas-tugas politik yang merela dapatkan dalam dikusi politik.

Temuan kedua di dalam penerapan metode pendidikan kader madya PPP, peneliti menemukan fakta bahwa yang merancang metode pendidikan kader madya adalah Bidang Kaderisasi . Bidang kaderisasi bertanggung jawab kepada penddidikan dan pelatahian kepengurusan (kader) Partai sesuai dengan tingkatannya. Bidang kaderisasi bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pendidikan-pelatihan bagi calon anggota dan kader partai. Beberapa kegiatan pendidikan kader, bertujuan untuk mempersiapkan jenjang pendidikan kader / anggota melalui kegiatan pendidikan secara bertingkat dan berkelanjutan. Sehingga pada tahap pembuatan metode pendidikan kader, bidang kaderisasi yang bertugas membuat metode pendidikan tersebut. Penjelasan mengenai, perancang dan pembuat metode pendidikan selama berlangsungnya proses pendidikan kader telah di ungkapkan oleh bapak Richard selaku kader PPP. Bapak Richard mengungkapkan bahwa, yang merancang metode pendidikan kader adalah Bidang kaderisasi. Ketika metode pendidilkan kader sudah di tetapkan, maka metode pendidikan tersebut akan di aplikasikan dalam melaksanakan proses pendidikan kader.

D. TUJUAN PENDIDIKAN POLITIK

Pendidikan politik ini penting untuk dipelajari karena dengan pendidikan politik ini diharapkan agar menjadi suatu ciri khas yang bersumber pada aspirasi yang ditemukan dari bangsa Indonesia itu sendiri secara nasional dan tercapainya sebuah tujuan yang direncanakan. Politik merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan kekuasaan untuk menjalankan sebuah peraturan dan menjalankan keputusan yang sah yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, perlunya penegakan sosial dalam menjalankan sebuah tata tertib. Tentunya kita ikut serta dalam menjalankan aktivitas politik ini dalam menentukan sebuah keputusan dan peraturan yang ada di masyarakat. Pendidikan dan politik merupakan hal yang saling berpengaruh. Adapun tujuan dari pendidikan politik ini adalah yang dimana dengan adanya pendidikan politik maka memberikan harapan penuh pada setiap diri individu lebih mengenal dan paham betul akan nilai yang baik dalam sistem perpolitikan yang dimana dalam penerapannya. Selain itu juga pendidikan politik ini mampu menjadikan seseorang dalam mengemban tanggung jawab walaupun adanya perubahan sikap partisipasi dalam dunia perpolitikan. Fungsi dari pendidikan politik itu sendiri agar dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan agar mereka dapat berpartisipasi dengan baik dalam berpolitik. Tentunya masyarakat harus aktif dalam berpolitik karena memiliki pengaruh yang besar. Masyarakat harus ikut dalam pengawasan politik agar terlaksananya politik yang ideal. Dengan itu betapa pentingnya pendidikan politik ini.

Bapak Richard berpendapat bahwa :

“Pendidikan politik bertujuan untuk membentuk mentalitas kader sesuai dengan ideology partai PPP, membentuk integritas kader sehingga memiliki sikap yang tegas dalam memperjuangkan sesuai ideology partai”.

Unsur pendidikan dalam pendidikan politik itu pada hakekatnya merupakan aktivitas pendidikan diri (mendidik dengan sengaja diri sendiri) yang terus menerus berproses di dalam person, sehingga orang yang bersangkutan lebih mampu memahami dirinya sendiri dan situasi-kondisi lingkungan sekitarnya. Kemudian mampu menilai segala sesuatu secara kritis, untuk selanjutnya menentukan sikap dan cara-cara penanganan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah lingkungan hidupnya. Dengan begitu pendidikan politik merupakan proses belajar bukan hanya untuk menambah informasi dan pengetahuan saja, akan tetapi lebih menekankan kemampuan mawas situasinya secara kritis, menentukan sikap yang benar, dan melatih ketangkasan aksi/ berbuat. Fawaz sebagai anggota dari sayap partai PPP GMPI (Generasi Muda Pembangunan Indonesia) mengamini pendapat Bapak Richard bahwa :

“Pendidikan politik yang dilakukan PPP di tingkat madya menanamkan ideology partai, secara mendalam. Sehingga kader diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai keislaman sesuai ideology partai PPP terhadap masyarakat.”

Inti dari pendidikan politik adalah pemahaman politik atau pemahaman aspek-aspek politik setiap permasalahan. Dan pemahaman politik berarti pemahaman konflik. Hidup bermasyarakat itu adalah hidup di tengah banyak dimensi konflik dan ketegangan. Berkaitan dengan pengertian ini, berbuat politik berarti mempengaruhi dan ikut mengambil keputusan di tengah medan politik dan pertarungan konflik-konflik.

Bapak Richard menambahkan, bahwasanya :

“Kader diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai keislaman paska mengikuti pendidikan politik tingkat menengah. ketika terjun ditengah-tengah masyarakat sebagai kader PPP harus mencerminkan bahwa kader PPP harus memiliki moral yang baik dimata masyarakat”.

Partai politik menjadi salah satu yang berperan dalam pendidikan politik. Karena partai selalu mempengaruhi masyarakat dalam sebuah keputusan. Partai akan “mendoktrin” kader untuk mempengaruhi masyarakat supaya berpihak kepada mereka. Maka pendidikan politik itu merupakan proses mempengaruhi individu agar dia memperoleh informasi lebih lengkap, wawasan lebih jernih, dan keterampilan politik yang lebih tinggi, sehingga dia bisa bersikap kritis dan lebih intensional/terarah hidupnya. Dengan demikian pendidikan politik mendorong orang untuk melihat diri sendiri dan lingkungannya dengan cara lain, lalu berani berbuat lain, menuju pada eskalasi diri dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pendidikan politik ini pada intinya adalah suatu pemahaman akan dunia politik beserta aspeknya pada suatu masalah. Karena kehidupan ini banyak dimensi konfliknya. Artinya dengan berbuat politik akan berpengaruh dan ikut ambil dalam keputusan di tengah konflik yang ada pada perpolitikan. Tujuan dari pendidikan politik untuk rakyat Indonesia sendiri, yaitu:

- a. Paham akan hal situasi politik-sosial yang penuh dari konflik.
- b. Dapat memperjuangkan kepentingan bersama dan ideologi agar sejahteranya kehidupan.
- c. Berani dalam bertindak tegas untuk membangun situasi yang damai.
- d. Membangun kesadaran dalam dunia politik yang ideal dan sadar berkenaan hak serta juga kewajiban sebagai anggota masyarakat dan negara yang baik.

Karakteristik kepribadian Indonesia lewat pendidikan politik, yaitu:

- a. Sadar untuk menaati hukum dan UUD 1945.
- b. Sadar hak serta kewajiban dan rasa tanggung jawab demi kebermanfaatan bangsa Indonesia.
- c. Aktif dalam berpartisipasi dalam pembangunan politik yang ideal.
- d. Bersinambung dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Selaras dalam menjalankan kehidupan lingkungan manusia dan lingkungan alam Pendidikan politik ini tidak hanya terarah untuk perubahan sikap pada dunia politik saja. Namun juga mengarahkan kedalam pembaharuan bentuk struktur politik dan juga lembaga masyarakatnya.

Melihat dari sistem pendidikan politik yang diterapkan Partai PPP sejalan dengan pendapat Robert Brownhil dan Patricia Smart bahwasanya tujuan pendidikan politik memiliki tujuan mencerdaskan dan juga mengembangkan kemampuan individu/kelompok untuk bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan juga lingkungan sekitarnya. Bahwasannya dapat dikatakan bahwa pendidikan politik dapat dikatakan sangat begitu penting bagi kader-kader partai agar nantinya dalam kehidupan bermasyarakat dapat diaplikasikan apa yang sudah didapatkan ketika mengikuti pendidikan politik.

E. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Sumber keuangan Parpol berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari APBN. Bantuan keuangan tersebut diberikan setiap tahun anggaran kepada Parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jumlah bantuan dihitung secara proporsional berdasarkan perolehan suara masing-masing Parpol.

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2019 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 213 - 377 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang

Mendapatkan Kursi di DPR Hasil Pemilu Tahun 2014 untuk Tahun Anggaran 2019, dan Keputusan Mendagri Nomor 213 - 7362 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Tahap II kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilu Tahun 2019 pada Tahun Anggaran 2019. Nilai Banparpol untuk DPW PPP berkisar 100.000.000.

Menurut penuturan dari Bapak Masrukhan bahwa

“Besaran bantuan partai politik yang di gelontorkan untuk DPW PPP berkisar 100.000.000. Banparpol itu sendiri di dapat dari rekapitulasi hasil suara partai ketika pemilu 2019. Proporsi penggunaan banparpol di prioritaskan untuk melakukan pendidikan politik untuk kader dan masyarakat”.

Di singgung soal kegiatan pendidikan politik yang telah di lakukan DPW PPP bagi kader Bapak masrukhan menuturkan :

“Bahwa kegiatan pendidikan politik DPW PPP Jawa Tengah di bagi 2 yaitu formal dan non formal. Kegiatan pendidikan politik formal yaitu mencakup kegiatan-kegiatan kaderisasi berjenjang (LKKD, LKKM, LKKU). Sedangkan pendidikan politik yang bersifat non formal yaitu kegiatan yang di luar kaderisasi berjenjang, dari DPW melakukan seminar, sarasehan, workshop, dialog interaktif, dan pertemuan-pertemuan partai lainya”.

Roda keuangan partai di sampaikan bahwa tidak hanya bergantung pada Banparpol saja, DPW Partai PPP Jawa Tengah menarik iuran kepada anggotanya yang sudah duduk di DPR.

BAB V

**FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN
PENDIDIKAN POLITIK DI DPW PPP JAWA TENGAH**

Proses pendidikan politik kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak selalu berjalan dengan mudah dan lancar. Terdapat faktor pendukung dan penghambat selama menjalankan proses pendidikan politik kader. Berdasarkan hasil penelitian dengan proses wawancara kepada para sumber informan, maka akan lebih dijelaskan sebagai berikut.

A. FAKTOR PENDUKUNG DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DPW PPP JAWA TENGAH

Berikut ini merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan penerapan pendidikan politik Partai Persatuan Pembangunan DPW Jawa Tengah yang diperoleh melalui wawancara sebagai berikut:

- a. Adanya Komitmen dari Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah dalam pelaksanaan pendidikan politik.
- b. Adanya kesadaran dan keaktifan kader Partai Persatuan Pembangunan DPW Jawa Tengah yang dimaksud dengan dua faktor yang pendukung pelaksanaan pendidikan politik diatas yakni: Adanya komitmen dari pengurus Partai Persatuan Pembangunan DPW Jawa Tengah dalam pelaksanaan pendidikan politik yaitu adanya kesepakatan bersama pengurus Partai Persatuan Pembangunan dalam menjalankan salah satu fungsi partai politik yaitu memberikan pendidikan politik terhadap kader-kadernya yang diyakini memiliki dampak baik terhadap pemahaman kader tentang tujuan berpolitik. Adapun maksud lain yang ingin dicapai yaitu para pengurus dapat mendekatkan diri terhadap kader-kadernya yang

tersebar di Jawa Tengah maupun masyarakat Jawa Tengah pada umumnya.

- c. Adanya kesadaran dan keaktifan kader Partai Persatuan Pembangunan yaitu: selama adanya pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh pengurus Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah sebagian besar adanya keterlibatan kader-kader partai yang bukan saja ikut terlibat saat kegiatan berlangsung, namun terlihat adanya antusias dari kader dalam melakukan konsolidasi terhadap sesama kader maupun terhadap masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Kedua faktor tersebut menjadi modal dasar bagi DPW PPP Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pendidikan politik, hal ini tercermin dalam hasil wawancara peneliti dengan para informan berikut ini. Hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPW PPP Jawa Tengah Bapak Richard sebagai berikut:

“Proses pelaksanaan fungsi partai sebagai media dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di dukung oleh komitmen dari partai politik itu sendiri dalam konteks ini Partai Persatuan Pembangunan melalui pengurus yang ada, konsisten ingin melaksanakan pendidikan politik selama enam kali dalam setahun, namun dalam pelaksanaan terkadang tidak mencapai target yang sudah ditentukan bersama. Komitmen ini juga tak lepas dari kemaun dan impian kami dalam membentuk kader partai yang militant dan juga dapat membesarkan Partai Persatuan Pembangunan DPW Jawa Tengah ini. Sehingga perjuangan-perjuangan yang ingin kami

capai kedepannya dapat pula diketahui oleh masyarakat Jawa Tengah”.

Hasil wawancara dengan Bapak Richard sebagai wakil ketua DPW PPP Jawa Tengah bahwa faktor pendukung pendidikan politik adalah adanya komitmen dari Partai Persatuan Pembangunan dapat melaksanakan pendidikan politik sebagai tugas dan fungsi partai politik sebagai diamanatkan dalam pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Komitmen ini tak lepas dari kemaun dan impian kami dalam membentuk kader partai yang militant dan juga dapat membesarkan Partai Persatuan Pembangunan di Jawa Tengah ini. Sehingga perjuangan-perjuangan yang ingin kami capai kedepannya dapat pula diketahui oleh masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

Jawaban senada juga diungkapkan oleh Bapak Masruhan selaku ketua DPW PPP Jawa tengah menyampaikan bahwa :

“Komitmen Partai Persatuan Pembangunan di Jawa Tengah dalam melaksanakan Pendidikan Politik dapat dilihat dari adanya kegiatan pendidikan politik selama enam kali dalam setahun, namun target tersebut dalam setahun ini terkadang tidak terlaksana semuanya. Tapi kami selalu berupaya agar satu atau dua kali dalam setahun harus ada, sehingga biasanyadilakukan lewat kegiatan diskusi, seminar dan workshop. Adapun maksud yang ingin kami capai dari kegiatan tersebut yakni dengan kehadiran Partai Persatuan Pembangunan di Jawa Tengah dapat

memberi nuansa yang berbeda terkait pemahaman kader partai maupun masyarakat terhadap keberadaan Partai Persatuan Pembangunan) dan juga dengan demikian hal ini diyakini dapat meminimalisir krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap Partai politik itu sendiri, dengan cara menghadirkan pemateri dari Tokoh-Tokoh Partai Persatuan Pembangunan, Tokoh Masyarakat Akademis. Yang begitu mendalami dan memahami dengan sesungguhnya tujuan dalam berpolitik.

Hasil wawancara dengan Bapak Richard selaku Wakil ketua DPW PPP Jawa Tengah bahwa pendidikan politik Partai Persatuan Pembangunan dapat dilihat dari komitmen partai Persatuan Pembangunan dalam melakukan kegiatan politik selama enam kali walaupun tidak terlaksana seperti target, sehingga biasanya dilakukan lewat kegiatan diskusi, seminar dan workshop. Adapun maksud yang ingin kami capai dari kegiatan tersebut yakni, dengan kehadiran Partai Persatuan Pembangunan dapat memberi nuansa yang berbeda terkait pemahaman kader partai maupun masyarakat terhadap keberadaan Partai Persatuan Pembangunan dan juga dengan dilakukannya pendidikan politik hal ini diyakini dapat meminimalisir krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap Partai politik itu sendiri dengan cara menghadirkan pemateri dari Tokoh-Tokoh Partai Persatuan Pembangunan, Tokoh Masyarakat, Akademisi. Yang begitu mendalami dan memahami dengan sesungguhnya tujuan dalam berpolitik.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Richard mengatakan bahwa:

“Penerapan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh pengurus Partai Persatuan Pembangunan selama ini merupakan hal penting yang menjadi komitmen kami sebagai pengurus dalam memncerdaskan insan politik di Jawa Tengah baik itu kader partai maupun masyarakat. Hal ini mengapa begitu penting, karena sebagai pengurus partai tentu punya tanggungjawab terhadap eksistensi partai maupun terhadap keberadaan kader yang selama ini terlihat tidak memahami benar apa yang menjadi perjuangan partai PPP ataupun hanya menggunakan partai ini (PPP) untuk tujuan tertentu lantas mengabaikan tanggungjawabnya sebagai warga Negara yang sebenarnya punya peranan penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui partai ini (PPP)”.

Hasil wawancara dengan Bapak Richard bahwa Penerapan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh pengurus Partai Persatuan Pembangunan selama ini merupakan hal penting yang menjadi komitmen kami sebagai pengurus dalam memncerdaskan insan politik di Jawa Tengah baik itu kader partai maupun masyarakat. Hal ini mengapa begitu penting, karena sebagai pengurus partai tentu punya tanggungjawab terhadap eksistensi partai maupun terhadap keberadaan kader yang selama ini terlihat tidak memahami benar apa yang

menjadi perjuangan partai PPP ataupun hanya menggunakan partai ini (PPP) untuk tujuan tertentu lantas mengabaikan tanggungjawabnya sebagai warga Negara yang sebenarnya punya perjuangan terhadap kepentingan masyarakat melalui partai ini (PPP). Sehingga dari upaya penerapan pendidikan politik ini dapat merubah pola pikir kader terhadap partai maupun politik.

Selanjutnya wawancara dengan Fawwaz selaku Kader Partai Persatuan Pembangunan mengatakan bahwa :

“Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan politik adalah adanya kesadaran Kader dan keaktifkan kader dalam melakukan kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan selama enam kali dalam setahun sesuai ketetapan partai PPP walaupun terkadang tidak mencapai target. Namun sejauh ini melalui pendidikan politik ini dilihat adanya peningkatan kesadaran dan pengetahuan politik secara utuh dan menyeluruh serta menciptakan kader Partai Persatuan Pembangunan yang bersih, peduli dan profesional sesuai dengan slogan partai serta memiliki militansi yang tinggi”.

Hasil wawancara dengan Fawwaz selaku Kader Partai Persatuan Pembangunan bahwa faktor pendukung pendidikan politik Partai Persatuan Pembangunan DPW Jawa Tengah dapat dilihat dari adanya kesadaran dan keaktifkan kader dalam melakukan kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan selama enam kali dalam setahun yang akan berdampak pada peningkatan kesadaran dan pengetahuan

politik secara utuh dan menyeluruh serta menciptakan kader Partai Persatuan Pembangunan yang bersih, peduli dan profesional sesuai dengan slogan partai serta memiliki militansi yang tinggi.

Dinyatakan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Bapak Richard selaku Wakil Ketua DPW PPP Jawa Tengah, Bapak Masruhan selaku ketua DPW PPP Jawa Tengah, Fawaz selaku Kader Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah bahwa faktor pendukung pendidikan politik DPW PPP Jawa Tengah antara lain komitmen dari Partai Persatuan Pembangunan sebagai bentuk dan tugas dan fungsi partai politik sebagai diamanatkan dalam pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, komitmen partai amanat nasional dalam melakukan kegiatan politik selama enam kali lewat kegiatan diskusi dan seminar tentang pendalaman mengenai sekolah Demokrasi, Sekolah Advokasi dan pengkaderan anggota Partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan dan elemen- elemen dasar mengenai pemilu dengan menghadirkan pemateri dari Tokoh-Tokoh Partai Persatuan Pembangunan, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Akademisi. Landasan pokok yang digunakan partai politik dalam mendukung pelaksanaan pendidikan politik yaitu Pancasila, UUD 1945, adanya kesadaran dan keaktifkan kader dalam melakukan kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan selama enam kali dalam setahun yang akan berdampak pada peningkatan kesadaran dan pengetahuan politik secara utuh dan menyeluruh serta menciptakan kader Partai Persatuan Pembangunan yang bersih, peduli dan profesional sesuai dengan slogan partai serta memiliki militansi yang tinggi, dan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 36 tahun 2010 Tentang Pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dimana dalam

konteks muatan materi pendidikan politik yang bersifat wajib dan pilihan.

B. FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DPW PPP JAWA TENGAH

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sebagai salah satu partai politik, PPP Jawa Tengah memiliki komitmen dalam melaksanakan pendidikan politik yang bertujuan untuk dapat memberi pencerahan politik kepada masyarakat maupun kader Partai Persatuan Pembangunan. Adapun beberapa faktor yang diyakini dapat menghambat pelaksanaan pendidikan politik yang sering ditemui oleh DPW PPP Jawa Tengah yakni:

1. Luas wilayah dan akses
2. Waktu pelaksanaan
3. Situasi politik nasional
4. Sumber daya manusia (SDM)

Yang dimaksud dengan beberapa hal diatas yang dapat menghambat pelaksanaan pendidikan politik Partai Persatuan Pembangunan DPW Jawa Tengah yaitu:

1. Luas wilayah dan akses (jalan); yang dimaksud dengan hal ini yakni luas Provinsi Jawa Tengah sangat berpengaruh terhadap gagalnya implementasi pendidikan politik karena wilayah Kabupaten Kupang yang terbagi dalam 29 Kabupaten dan 6 kota.
2. Waktu pelaksanaan; hal ini juga sangat berpengaruh atas suksesnya implementasi pendidikan politik oleh partai PPP, menjadi berpengaruh karena pengurus maupun kader tidak memiliki kesempatan yang sama dalam pelaksanaan walaupun sudah adanya jadwal yang ditetapkan oleh pengurus.

3. Situasi politik Nasional; yang dimaksud dengan hal tersebut adalah pengaruh konstalasi politik nasional yang berdampak sampai ke tingkat daerah seperti yang ditemukan oleh pengurus partai PPP bahwa kehadiran kader maupun masyarakat dalam pelaksanaan terkadang sangat minim. Hal ini disebabkan stigma masyarakat terhadap Partai Persatuan Pemangunan dicap sebagai partai tua.
4. Sumber Daya Manusia; yang dimaksud pada hal tersebut adalah pemahaman kader ataupun masyarakat terhadap politik yang begitu minim sehingga mereka beranggapan bahwa pendidikan politik itu tidak bermanfaat lantas hal tersebut berdampak pada tingkat kehadiran saat kegiatan berlangsung.

Dengan beberapa faktor penghambat tersebut, nampak jelas dalam hasil wawancara berikut ini. Sebagaimana hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPW PPP Jawa Tengah Bapak Richard, pelaksanaan pendidikan politik tidak terlepas dari berbagai kendala yakni:

“Ketidakhadiran Kader disebabkan oleh berbagai macam faktor yaitu luas wilayah dan topografi Provinsi Jawa Tengah yang berdampak pada kehadiran kader dalam kegiatan pendidikan politik serta soal kendala waktu karena kebanyakan kader dan kepengurusan berasal dari kalangan petani yang aktivitasnya lebih banyak diladang sehingga waktunya tidak tepat dalam menghadirkan semua kader”.

Hasil wawancara dengan Bapak Richard selaku Wakil Ketua DPW PPP Jawa Tengah kelemahan Partai Persatuan Pembangunan dalam melakukan pendidikan politik lebih banyak pengaruh faktor luas wilayah dan topografi Provinsi Jawa Tengah yang berdampak kehadiran kader serta soal

kendala waktu karena kebanyakan kader dan kepengurusan berasal dari kalangan petani.

Dalam pelaksanaan pendidikan politik kendala lain yang dapat menghambat pendidikan politik bagi kader adalah faktor sebagaimana wawancara dengan Bapak Masruhan sebagai Ketua DPW PPP Jawa Tengah: Fenomena politik nasional yang menganggap Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai yang membela agama tertentu sampai pada perbedaan politik Partai Persatuan Pembangunan yang lebih condong ke kelompok tertentu, sehingga terus terbawa ke daerah salah satunya di Provinsi Jawa Tengah dan dalam kader sendiri yang lebih banyak dipengaruhi soal literasi politik dan sumber daya manusia sehingga Image Negatif terus melekat dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan.

Dinyatakan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Bapak Richard selaku sebagai Wakil Ketua DPW PPP Jawa Tengah, Bapak Masruhan sebagai Ketua DPW PPP Jawa Tengah, bahwa faktor penghambat pendidikan politik DPW PPP Jawa Tengah antara lain pengaruh luas wilayah dan topografi kabupaten kupang serta soal kendala waktu karena kebanyakan kader dan kepengurusan berasal dari kalangan petani yang berdampak pada kader sendiri yang lebih banyak dipengaruhi soal literasi politik dan sumber daya manusia.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Materi yang digunakan DPW Partai PPP Dalam Pendidikan Politik bagi kader partai Persatuan Pembangunan DPW Jawa Tengah adalah materi tentang Ideology partai, Demokrasi, dan Advokasi yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, strategi pemenangan pemilu karena tahun 2019 yang berkaitan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan sistem pemilu yang lebih menitikberatkan pada kampanye politik mulai dari tata aturan kampanye sampai larangan kampanye. Metode yang digunakan DPW PPP Jawa Tengah Dalam Pendidikan Politik bagi kader partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah adalah metode yang langsung dan bersifat ideologis serta penggunaan bahasa politik yang mudah dipahami oleh kader, diskusi yang terbangun dalam suasana kekeluargaan yang sangat fleksibel dan harmonis, diskusi dan seminar tentang berpolitik yang luhur sesuai dengan cita-cita konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan ceramah, diskusi, dialog dua arah sehingga mampu sarana bagi penguatan dan peningkatan kualitas kader partai politik.

2. Faktor pendukung pelaksanaan pendidikan politik DPW Partai PPP Jawa Tengah adalah komitmen dari Partai Persatuan Pembangunan lewat Sekolah Demokrasi sebagai bentuk dan tugas dan fungsi partai politik, landasan pokok yang digunakan partai politik dalam mendukung pelaksanaan pendidikan politik yaitu Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, kesadaran dan keaktifkan kader serta Peraturan menteri dalam negeri Nomor 36 tahun 2010 Tentang Pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dimana dalam konteks muatan materi pendidikan politik yang bersifat wajib dan pilihan. Faktor Penghambat pelaksanaan pendidikan politik DPW Partai PPP Jawa Tengah adalah pengaruh faktor luas wilayah dan topografi Provinsi Jawa Tengah serta soal kendala waktu, stigma politik yang negatif menganggap Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai yang membela kaum tertentu dan partai tua masih melekat di masyarakat,

B. SARAN

1. Pengintensan pola komunikasi yang baik antara pengurus partai dan kader sehingga partisipasi dalam pendidikan politik dapat diminimalisir sesuai dengan agenda Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
2. Sosialisasi dan pendidikan politik secara intens tentang haluan dan garis perjuangan partai persatuan pembangunan sehingga dapat menghilangkan citra negatif tentang Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai kalangan tertentu sehingga dapat menciptakan kader yang memiliki tekad dalam membesarkan Partai Persatuan Pembangunan.
3. Website DPW PPP kurang maksimal untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan partai. Harapannya website bisa dikelola dengan

maksimal sehingga masyarakat mudah menggali informasi tentang DPW PPP Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Pt Gramedia Pusataka Utama.
- Firmanzah. 2008, *Mengelola Partai Politik*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Affandi, Idrus. (2009). *Bedah Buku Political Education Dari Robert Brownhill Dan Patricia Smart*. Bandung : Kencana Utama.
- Kartono, K. (2009). *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung : Mandar Maju.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo
- Bugin, Burham. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana 2014).
- Creswell, John. *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2006).
- Hartono, Rudy. 2016. *Peran Pendidikan Politik Bagi Kehidupan Masyarakat*. Yogyakarta : Universitas Negri Yogyakarta.
- Indriyani Dkk. 2020. *Peranan Pendidikan Politik Terhadap Pembentukan Kader Parpol Pada Partai Gerindra Di Kabupaten Cianjur*. Cianjur: Universitas Suryakencana.
- Nurdiansyah, Edwin. 2015. *Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negaradalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Sunarso. 2007. *Pendidikan Politik Dan Politik Pendidikan. Civic Education Departmen*. Vol 4, No 2.

Putri Handayani Nurdin. 2016. *Implementasi Kewajiban Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Di Kabupaten Bone Bolango*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Syarifatul Aini. 2019. *Faktor Kendala Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*. Uin Sultan Maulana Hasanuddin.

Ahmad Syaiful Ashar. 2011. *Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Dpd Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Kabupaten Semarang Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*. Universitas Negeri Semarang.

Slamet Ph. 2014. *Politik Pendidikan Indonesia Dalam Abad 21*. Jurnal Cakrawala Pendidikan. Th. Xxxiii, No. 3

Ahmad Zain Sarnoto. 2012. *Konsepsi Politik Pendidikan Indonesia*. Educhild. Vol.01 No.1

Sandika, Afen (2018) *Peran Pdi Perjuangan Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Mesuji Tahun 2017*. Undergraduate Thesis, Uin Raden Intan Lampung.

Kantaprawira, Rusadi. 1999. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.

Affandi, "Idrus. 1996. *Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Pendidikan Politik*. Disertasi.

Wahab, Abdul Azis. 1996. *Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik: Model Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia menuju Warga Negara Global*". Bandung.

Alfian, 1981. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Rush. Michael dan Philip Althoff, 1997. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Ppp.or.id

Wawancara dengan Bapak Masruhan selaku ketua DPW PPP Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak Richard selaku Wakil Ketua DPW PPP Jawa Tengah pada tanggal 23 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak Richard selaku Wakil Ketua DPW PPP Jawa Tengah pada tanggal 10 maret 2022.

Wawancara dengan Fawaz selaku kader PPP Jawa Tengah pada tanggal 12 juni 2022.

Lampiran



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Arif Ashari
Tempat tanggal lahir : Salatiga, 12 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Telpon HP : 085865746317
E-mail : Ariefsombo21@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2003-2010 : SD N Kesongo 1
2010-2013 : MTs N Salatiga
2013-2016 : SMA N 2 Salatiga
2016-Sekarang : UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi :

1. ROHIS Kota Salatiga 2015-2016
2. PMII Rayon FISIP
3. PMII Komisariat UIN Walisongo
4. DEMA FISIP 2018-2019